

**KEPENTINGAN NASIONAL INDONESIA TERHADAP JEPANG
DALAM *JAPAN-INDONESIA MARITIME FORUM*
PERIODE 2017-2018**

(Skripsi)

Oleh

CHAINDRA ADITYAS RAMADHAN



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2019**

ABSTRAK

Kepentingan Nasional Indonesia terhadap Jepang dalam *Japan-Indonesia Maritime Forum* Periode 2017-2018

Oleh

Chaindra Adityas Ramadhan

Indonesia tentu memiliki kepentingan yang kuat bekerjasama dalam bidang maritim dengan Jepang. Walaupun Indonesia dan Jepang telah tergabung dalam *Expanded ASEAN Maritime Forum* (EAMF) yang didalamnya terdapat Indonesia dan Jepang, kedua negara ini tetap memilih untuk membentuk hubungan bilateral di bidang maritim diluar EAMF, yaitu dengan membentuk *Japan-Indonesia Maritime Forum*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tujuan khusus kebijakan luar negeri Indonesia mengenai *Japan-Indonesia Maritime Forum* serta untuk mengetahui kepentingan nasional Indonesia dan intensitas kepentingan nasional Indonesia terhadap Jepang dalam *Japan-Indonesia Maritime Forum* periode 2017-2018. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data sekunder yang utamanya berasal dari *The Joint Press Release by the Ministry of Foreign Affairs of Japan and Coordinating Ministry of Maritime Affairs of the Republic of Indonesia on the occasion of the visit of Coordinating Minister for Maritime Affairs Lt. Gen. (Retired) Luhut B. Pandjaitan to Japan*. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan dengan mengacu pada konsep kepentingan nasional dan teori kebijakan luar negeri. Hasil dari penelitian ini memperlihatkan bahwa tujuan khusus kebijakan luar negeri Indonesia mengenai *Japan-Indonesia Maritime Forum* adalah tujuan inti. Terdapat empat kepentingan nasional Indonesia terhadap Jepang dalam *Japan-Indonesia Maritime Forum* Periode 2017-2018, yaitu kepentingan pertahanan, ekonomi, tatanan dunia, dan ideologi. Intensitas dari keempat kepentingan tersebut adalah *major* yaitu ketika politik, ekonomi, dan ideologi negara dapat dipengaruhi oleh peristiwa dan trend pada dunia internasional. Kepentingan nasional Indonesia terhadap Jepang dalam *Japan-Indonesia Maritime Forum* periode 2017-2018 adalah upaya Presiden Jokowi dalam mewujudkan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia.

Kata kunci : Kepentingan Nasional, Indonesia, Jepang, *Maritime, Forum*.

ABSTRACT

Indonesia's National Interest toward Japan in the Japan-Indonesia Maritime Forum 2017–2018 Period

By

Chaindra Adityas Ramadhan

Indonesia certainly has a strong interest in cooperation in the maritime field with Japan. Although Indonesia and Japan have joined in the Expanded ASEAN Maritime Forum (EAMF), yet the two countries continue to choose to build bilateral relations in the maritime field outside of EAMF, that is by establishing the Japan-Indonesia Maritime Forum. This study aims to analyze the specific objectives of Indonesia's foreign policy regarding the Japan-Indonesia Maritime Forum and to find out Indonesia's national interests and the intensity of Indonesia's national interests towards Japan in the Japan-Indonesia Maritime Forum for the period 2017-2018. The data used in this study is the secondary data which mainly come from the Joint Press Release by the Ministry of Foreign Affairs of Japan and Coordinating Ministry of Maritime Affairs of the Republic of Indonesia on the occasion of the Visit of Coordinating Minister for Maritime Affairs. Gen. (Retired) Luhut B. Pandjaitan to Japan. This research uses qualitative research methods and employs to the concepts of national interest and foreign policy theory. The results of this study show that the specific objectives of Indonesia's foreign policy regarding the Japan-Indonesia Maritime Forum are the core objectives. This study finds that there are four Indonesian national interests towards Japan in the Japan-Indonesia Maritime Forum for the period 2017-2018, namely, the interests of defense, economy, world order and ideology. The intensity of these four interests is a major, namely when the political, economic and ideological state can be influenced by events and trends in the international world. Indonesia's national interest in Japan in the Japan-Indonesia Maritime Forum for the 2017-2018 Period is President Jokowi's efforts to realize Indonesia as the World Maritime Nexus.

Keywords: National Interest, Indonesia, Japan, Maritime, Forum

**KEPENTINGAN NASIONAL INDONESIA TERHADAP JEPANG
DALAM *JAPAN-INDONESIA MARITIME FORUM*
PERIODE 2017-2018**

Oleh

CHAINDRA ADITYAS RAMADHAN

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUBUNGAN INTERNASIONAL**

Pada

**Program Sarjana Ilmu Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2019**

Judul Skripsi : Kepentingan Nasional Indonesia terhadap Jepang
dalam *Japan-Indonesia Maritime Forum* Periode
2017-2018

Nama Mahasiswa : Chaindra Adityas Ramadhan

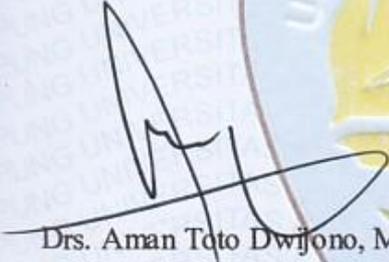
Nomor Pokok Mahasiswa : 1516071057

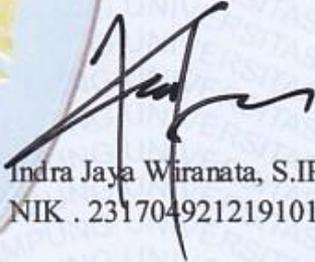
Jurusan : Hubungan Internasional

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing


Drs. Aman Toto Dwijono, M.H
NIP. 19570728 198703 1 006


Indra Jaya Wiranata, S.IP., M.A
NIK . 231704921219101

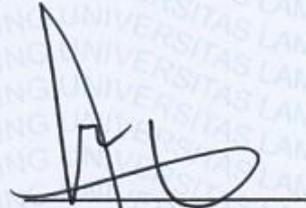
2. Ketua Jurusan Hubungan Internasional


Dr. Ari Darmastuti, M.A
NIP. 19600416 198603 2 002

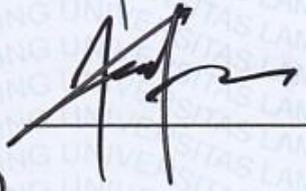
MENGESAHKAN

Tim Penguji

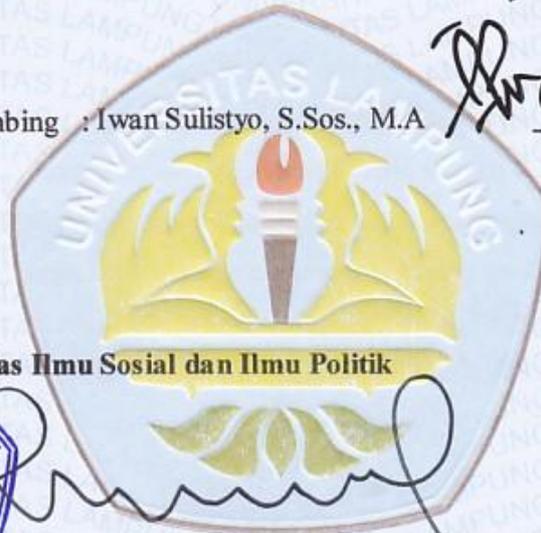
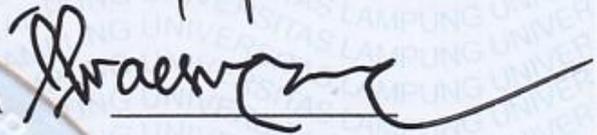
Ketua : Drs. Aman Toto Dwijono, M.H.



Sekretaris : Indra Jaya Wiranata, S.IP.,M.A



Penguji
Bukan Pembimbing : Iwan Sulistyio, S.Sos., M.A



Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dr. Syarif Makhya, M.Si.
NIP. 19590803 198603 1003

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 18 Juli 2019



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS LAMPUNG**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
JURUSAN HUBUNGAN INTERNASIONAL**

Jalan Prof. Dr. Soemantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung 35145
Telepon: (0721) 704626 email: psih@fisip.unila.ac.id Laman: <http://hi.fisip.unila.ac.id/>

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana), baik di Universitas Lampung maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan komisi pembimbing dan penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan sebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah berlaku di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 18 Juli 2019
Yang membuat pernyataan,



Chandra Adityas Ramadhan
NPM : 1516071057

RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap penulis adalah Chaindra Adityas Ramadhan atau akrab dipanggil Kent. Lahir di Pemanggilan, Natar, pada 23 Januari 1997. Penulis merupakan anak pertama dari tiga bersaudara, buah hati Bapak Hendra Junaidi dan Ibu Nelly Rosmala Dewi.

Pendidikan formal yang pernah di tempuh penulis adalah Taman Kanak-Kanak (TK) ‘Aisyiyah Bustanul Athfal Natar Lampung Selatan dan Sekolah Dasar Negeri (SDN) 2 Rajabasa Bandar Lampung sampai tahun 2009, Pendidikan formal selanjutnya di tempuh di Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Natar Lampung Selatan pada tahun 2009-2012 dan Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 1 Natar Lampung Selatan diselesaikan pada tahun 2015.

Penulis melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi dengan terdaftar sebagai mahasiswa Jurusan Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung pada tahun 2015 dan diterima melalui jalur SBMPTN. Selama menjadi mahasiswa, penulis pernah mengikuti organisasi tingkat universitas yaitu Radio Kampus Universitas Lampung (Rakanila) dan menjabat sebagai Production Visual pada tahun kepengurusan 2017 dan sebagai Manager Engineering pada tahun kepengurusan 2018. Penulis juga aktif pada Ikatan Muli Mekhanai Kota Bandar Lampung (IMKOBAL). Penulis melaksanakan KKN Kebangsaan 2018 di Desa Batu Tegi, Kecamatan Air

Naningan, Kabupaten Tanggamus. Penulis turut berpartisipasi dalam kegiatan HMJ Hubungan Internasional Universitas Lampung yaitu menjadi *Liaison Officer* (LO) dalam Pertemuan Sela Nasional Mahasiswa Hubungan Internasional se-Indonesia XXX 2018. Selama berkuliah penulis juga bekerja *part-time* pada Wedding Organizer

MOTTO

“I Kent do it”

-Chaindra Adityas Ramadhan-

“I can not tell you the key to succes but
the key of failure is trying to please everyone”

-Unknown-

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan puji dan syukur atas kehadiran ALLAH SWT.

Kupersembahkan Skripsi ini kepada:

Kedua orang tuaku, Bapa' Hendra dan Mama' Nelly yang senantiasa mendukung
dan mendoakanku dalam setiap langkah hidupku;

Keluarga besar penulis yang selalu memberikan motivasi untuk penulis berproses;

Untuk dosen-dosen yang tanpa lelah berbagi ilmu dan menjadi panutan penulis
dalam menghadapi masa depan;

Sahabat-sahabat tercinta dan teman-teman seperjuangan HI Unila 2015, teman-
teman Rakanila serta IMKOBAL yang telah berbagi waktunya untuk berbagi suka
dan duka;

Serta untuk Almamater tercinta,

Jurusan Hubungan Internasional

Universitas Lampung

SANWACANA

Puji Syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya skripsi ini dapat terselesaikan. Skripsi dengan judul “**Kepentingan Nasional Indonesia terhadap Jepang dalam *Japan-Indonesia Maritime Forum Periode 2017-2018***” adalah salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Hubungan Internasional di Universitas Lampung. Dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Syarief Makhya selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
2. Ibu Dr. Ari Darmastusi, M.A., selaku Ketua Jurusan Hubungan Internasional, FISIP, Universitas Lampung.
3. Bapak Drs. Aman Toto Dwijono, M.H. selaku Pembimbing Utama skripsi dan Pembimbing Akademik penulis. Terima kasih atas jasa, ilmu, waktu, saran, masukan, yang sangat berguna terhadap pengembangan diri penulis. Mohon maaf apabila terdapat perkataan dan tindakan penulis yang tercela, baik secara sadar maupun tidak.
4. Mas Iwan Sulisty, S.Sos., M.A selaku dosen pembahas. Terima kasih atas segala ilmu, saran, masukan dan telah membantu penulis dalam memperbaiki penulisan skripsi. Mohon maaf apabila terdapat perkataan dan tindakan penulis yang tercela, baik secara sadar ataupun tidak. Sukses selalu buat Mas Tyo.

5. Mas Indra Jaya Wiranata, S.IP., M.A selaku pembimbing skripsi yang selama ini senantiasa membimbing penulis dalam berbagai hal. Terima kasih telah menjadi dosen pembimbing tapi tidak berasa berhadapan dengan dosen pembimbing setiap penulis bimbingan. Mas Indra lebih berasa seperti seorang Abang yang membantu adiknya dalam mengerjakan tugas kuliahnya. Terima kasih atas pembelajaran akademik dan pembelajaran kehidupannya. Mohon maaf apabila terdapat perbuatan atau perkataan yang tidak berkenan baik yang di sengaja maupun tidak sengaja. Semoga kebaikan Mas Indra menjadi ladang pahala dan kebahagiaan. Salam buat Biru dan Mba Nisa, Mas.
6. Bapa' Hendra Junaidi dan Mama' Nelly Rosmala Dewi selaku kedua orang tua yang selalu ingin penulis cintai. Terima kasih sudah menunggu dengan ikhlas sampai penulis dapat menyelesaikan studi ini. Terima kasih atas segala jerih payah sudah dilakukan untuk penulis, kasih sayang, dukungan baik moril dan materil, serta doa-doa yang selalu dipanjatkan untuk penulis. Mohon maaf dari lubuk hati yang paling dalam jika selama ini telah mengecewakan dan selalu menyusahkan. Semoga Bapa' dan Mama' diberikan kesehatan dan selalu dalam perlindungan Allah SWT.
7. Kedua adikku Intan Florence Oktarena dan Dara Ghassani Sabrina. Terima kasih telah menjadi penghibur Aja Kent, dikala sedang lelah dalam menulis skripsi ini. Teruslah kalian berdua belajar hingga menjadi kebanggaan Bapa', Mama', dan Aja Kent. Semoga kalian berdua sehat selalu dan dilindungi oleh Allah SWT.

8. Teman-teman ThaiClub (ชมรมไทย) ku, Hasya, Sarah, Hayyu dan Clara selaku sahabat seperjuangan yang penulis sayangi. Terima kasih selama 4 tahun ini telah menjadi *support system* penulis, sehingga penulis mampu menyelesaikan perkuliahan ini sampai selesai. Terima kasih telah berbagi suka dan duka. Semoga kita semua bisa mencapai sukses kita masing-masing.
9. Firly, Angky, Arif, Ijul, Edo, dan Wahit selaku sahabat perkuliahan. Terima kasih sudah menjadi sahabat yang selalu memberikan tawa, ceria dan menemani dalam perjalanan dari awal kuliah hingga tidak ada kuliah lagi. Jika tua nanti kita telah hidup masing-masing, ingatlah hari ini.
10. Gamma, Bayu, Aji dan Fadil selaku teman penulis sejak bangku SD. Terima kasih atas dukungan, doa serta selalu bersedia memberi motivasi dan semangat dalam penyelesaian skripsi ini. Penulis berharap kita akan mencapai cita-cita yang kita harapkan.
11. Budaiku, Himmaku, Walniku, Uhtiku, Ijulku dan Gandiku selaku sahabat sekaligus keluarga KKN Kebangsaan 2018 yang penulis sayangi. Terima Kasih atas 30 hari kebersamaan di Pekon Batu Tegi. Terima kasih atas pembelajaran kehidupannya. Penulis percaya suatu saat kita akan bertemu kembali. Semoga kita mampu mencapai sukses kita masing-masing. Sehat selalu buat kalian semua.
12. Tya, Ica, Anya, Adit, Anita, Fika, Ardhyta, Tata, Fika, Cipa, Nia Besar, Nia Kecil, Anin, Ega, Retno Ningsih, Intan Nata, Donna, Ulul, Ajeng, Khansa, Mela, Arief Cahyo, Hani, Dean, Dedek, Didit, Ridho, Gedo, Fitrah, Eva, Sasa, Riris, Devita, Sevy, Olvy, Hana, Linda, Wita selaku teman angkatan

penulis dalam bangku perkuliahan. Terima kasih telah menjadi bagian dalam kehidupan penulis, Terima kasih atas kebersamaanya dalam berproses menjadi pribadi yang lebih baik.

13. Kak Saka, Kak Meka, Kak Oni, Kak Nadira, Kak Zaim, Farhan, Maul, Bima, Nindy, Ghina, teman-teman, kakak-kakak serta adik-adik Jurusan Hubungan Internasional yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Terima kasih sudah berbagi dukungan, doa, keceriaan, dan menjadi bagian dari perjalanan perkuliahan penulis selama kurang lebih empat tahun bersama.
14. Staff Jurusan, Dekanat, Universitas terima kasih telah berperan dan membantu penulis dalam segala urusan administrasi yang diperlukan.
15. Dosen-dosen Jurusan Hubungan Internasional terima kasih atas seluruh ilmu yang telah diberikan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dengan lancar.
16. Teman-teman Rakanila ku, terima kasih telah membantu penulis dalam membentuk karakter penulis yang lebih percaya diri. Terima kasih atas keseruan-keseruan selama penulis menjadi bagian Rakanila. Penulis ucapkan terima kasih kepada Kak Supran, Kak Aca, Kak Rizqa, Kak Haifa, Kak Jihan, Yayan, Bagas, Gusti, Almh. Nada, Aulia, Christine, Febri, Rara, Frilly, Upe, Fia, Wia, Agung, Deni, Deddy, Awal, Naomi, Eli, Ria, Sasa, Muki, Satrio, Rahmat serta teman-teman lainnya. Semoga kita bisa meraih sukses kita masing-masing.
17. Keluarga IMKOBAL, Kak Indra dan Kak Billy, terima kasih telah membantu penulis dalam membangun diri menjadi lebih baik. Terima kasih juga kepada Kak Alqodri, Agung Jhoniko, Angky, Adhwa Jinaan, Azizah,

Kak Ryan, Kak Andry, Ghana, Kak Dea, Kak Risty, Adam, Tesu, Karin, Desi, Shenia, Marcell serta teman-teman lainnya atas canda, tawa dan kebersamaan selama ini. Semoga kita semua menjadi orang yang mampu bermanfaat bagi orang lain.

18. Untuk orang-orang yang belum disebutkan dan tidak mungkin untuk disebutkan. Penulis mengucapkan terima kasih atas semuanya, yang pernah terjadi dahulu telah membuat penulis menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan memberikan pembelajaran yang sangat berharga bagi penulis.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari kata kesempurnaa, akan tetapi sedikit harapan semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi semua. Amin

Bandar Lampung, 18 Juli 2019
Penulis,

Chandra Adityas Ramadhan

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR SINGKATAN	v
I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	9
1.3. Tujuan Penelitian	9
1.4. Manfaat Penelitian	10
II. TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1. Penelitian Terdahulu	11
2.2. Landasan Analitis	20
2.2.1 Konsep Kepentingan Nasional	20
2.2.2 Teori Kebijakan Luar Negeri	24
2.3. Kerangka Analitis	27
III. METODE PENELITIAN	28
3.1. Tipe Penelitian	28
3.2. Fokus Penelitian	29
3.3. Jenis dan Sumber Data	30
3.4. Teknik Pengumpulan Data	30
3.5. Teknik Validitas Data	31
3.6. Teknik Analisis Data	31

IV.	GAMBARAN UMUM.....	33
	4.1 Gambaran Umum Indonesia	33
	4.2 Hubungan Bilateral Indonesia-Jepang	36
	4.3 <i>Japan-Indonesia Maritime Forum</i>	39
V.	HASIL DAN PEMBAHASAN	48
	5.1 Kebijakan Luar Negeri Indonesia mengenai <i>Japan-Indonesia Maritime Forum</i>	48
	5.2. Kepentingan Nasional Indonesia terhadap Jepang dalam <i>Japan-Indonesia Maritime Forum</i> Periode 2017 – 2018	50
	5.2.1 Kepentingan Pertahanan	51
	5.2.1.1 Keamanan dan Keselamatan di bidang Maritim	51
	5.2.1.2 <i>Archipelagic and Island States</i> atau Negara Kepulauan dan Negara Pulau	53
	5.2.2 Kepentingan Ekonomi	55
	5.2.2.1 Pembangunan Ekonomi termasuk Infrastruktur dan Konektivitas di Indonesia Pada Bidang Maritim	56
	5.2.2.2 Pembangunan Infrastruktur	61
	5.2.2.3 Pengembangan Pulau-Pulau Terluar	71
	5.2.2.4 Isu Ekonomi lainnya	75
	5. 2. 3. Kepentingan Tatanan Dunia	80
	5. 2. 4. Kepentingan Ideologi	82
	5.3. Analisis Intensitas Kepentingan Nasional Indonesia terhadap Jepang dalam <i>Japan-Indonesia Maritime Forum</i> Periode 2017 – 2018	84
	5.3.1 Analisis Intensitas Kepentingan Pertahanan	84
	5.3.2 Analisis Intensitas Kepentingan Ekonomi	85
	5.3.3 Analisis Intensitas Kepentingan Tatanan Dunia	86
	5.3.4 Analisis Intensitas Kepentingan Ideologi	86
VI.	PENUTUP	89
	6.1 Kesimpulan	89
	6.2 Kritik dan Saran	90

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1. Perbandingan Penelitian Terdahulu	19
Tabel 4.1. Proses Pendirian <i>Japan-Indonesia Maritime Forum</i>	47
Tabel 5.1. Intensitas Kepentingan Nasional Indonesia terhadap Jepang dalam <i>Japan-Indonesia Maritime Forum</i> Periode 2017–2018.....	87
Tabel 5.2. Kepentingan Nasional Indonesia terhadap Jepang dalam <i>Japan-Indonesia Maritime Forum</i> Periode 2017–2018.....	88

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 Peta Wilayah Konflik Laut China Selatan.....	2
Gambar 1.2 Kerangka Analitis	27

DAFTAR SINGKATAN

AIS	:	<i>Archipelagic and Island States</i>
AISF	:	<i>Archipelagic and Island States Forum</i>
Amdal	:	Analisis Dampak Lingkungan
AMF	:	<i>ASEAN Maritime Forum</i>
ARF	:	<i>ASEAN Regional Forum</i>
ASEAN	:	<i>Association of Southeast Asian Nations</i>
BAKAMLA	:	Badan Keamanan Laut
CBM	:	<i>Confidence Building Measures</i>
CSR	:	<i>Corporate Social Responsibility</i>
DKI	:	Daerah Khusus Ibukota
EAMF	:	<i>Expanded Asian Maritime Forum</i>
EAS	:	<i>East Asian Summit</i>
EV	:	<i>Electrified Vehicle</i>
IORA	:	<i>Indian Ocean Rim Association</i>
JBIC	:	<i>Japan Bank for International Cooperation</i>
JCG	:	<i>Japan Coast Guard</i>
JFY	:	<i>Japanese Fiscal Year</i>
JICA	:	<i>Japan International Cooperation Agency</i>
JSS	:	<i>Jakarta Sewerage System</i>

Kemenko	:	Kementerian Koordinator
KPPIP	:	Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas
LCS	:	Laut China Selatan
LNG	:	<i>Liquid Natural Gas</i>
Menko	:	Menteri Koordinator
NKRI	:	Negara Kesatuan Republik Indonesia
PD	:	<i>Preventive Diplomacy</i>
Perpres	:	Peraturan Presiden
PLN	:	Perusahaan Listrik Negara
PLTSa	:	Pembangkit Listrik Tenaga Sampah
PLTU	:	Pembangki Listrik Tenaga Uap
PM	:	Perdana Menteri
PUPR	:	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
TPA	:	Tempat Pembuangan Akhir
TPPAS	:	Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah
UNCLOS	:	<i>United Nations Convention on the Law of the Sea</i>
VBSS	:	<i>Visit Boarding Search Seizure</i>
ZEE	:	Zona Ekonomi Eksklusif

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Asia adalah benua terbesar di dunia, namun benua ini tidak seperti Benua Eropa yang telah terintegrasi secara transportasi darat. Hal ini karena relatif kurangnya infrastruktur transportasi darat yang menghubungkan antar wilayah dan antarnegara, serta geografis alamnya. Faktor inilah yang mendorong transportasi laut memainkan peran yang sangat penting di wilayah ini. Wilayah Asia berperan penting sebagai jalur pengiriman antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, yang secara ekonomi dan strategis penting bagi Asia Timur Laut dan Amerika Serikat.¹

Pada tingkat global, sektor maritim melayani hampir 80% dari perdagangan dunia. Sekitar 75% dari perdagangan maritim global dan 35 juta barel minyak per hari ditransfer melalui platform maritim. Ekonomi negara-negara Asia Pasifik, termasuk Jepang dan China, juga sangat tergantung pada perdagangan maritim (*maritime trade*), sementara Asia sendiri menguasai dan mengoperasikan lebih dari 40% armada komersial global.²

¹ Joshua H. Ho dan Sam Bateman. (2012). *Maritime Challenges and Priorities in Asia*. Routledge, New York. Hal.1.

² AA Banyu Perwita dan Bantarto Bandoro. (2013). *Pengantar Kajian Strategis*. Graha Ilmu. Yogyakarta. Hal. 72.

Posisi strategis ini tidak hanya membawa keuntungan bagi negara-negara di Asia, tetapi juga menimbulkan berbagai permasalahan maritim. Terdapat beberapa ancaman yang dihadapi oleh negara-negara Asia dibidang maritim diantaranya yaitu pembajakan dan perompakan bersenjata (*piracy*) terhadap kapal, *maritime terrorism*, perdagangan narkoba dan senjata terlarang, penyelundupan manusia, polusi, *illegal fishing*, bencana alam dan konflik maritim antar negara.³ Salah satu konflik maritim antar negara yang dihadapi oleh negara-negara Asia adalah Konflik di Laut China Selatan (LCS). Berikut ini merupakan peta wilayah konflik LCS.



Gambar 1.1. Peta Wilayah Konflik Laut China Selatan

Sumber : The Economist. 2015. diakses dari <https://www.economist.com/leaders/2015/05/02/sea-of-troubles>.

LCS merupakan sebuah wilayah yang memiliki banyak pulau yang sebagian besar tidak berpenghuni. Pulau Paracel dan Spartly merupakan

³ Joshua H. Ho dan Sam Bateman. (2012). *Maritime Challenges and Priorities in Asia*. Routledge, New York. Hal.1.

gabungan-gabungan pulau dan bebatuan yang paling banyak diklaim oleh negara-negara.⁴ Pulau Paracel dan Sparty ini diklaim oleh China, Vietnam, Filipina, Malaysia, Brunei Darussalam, dan Taiwan. Daerah ini merupakan wilayah yang telah diduduki oleh berbagai negara yang mengklaim dan telah menjadi sumber konflik LCS yang berpengaruh pada perdamaian dan stabilitas di kawasan Asia-Pasifik.⁵

Meskipun Indonesia secara teknis bukanlah pihak yang turut mengklaim wilayah di LCS namun pada kenyataannya, Indonesia merupakan pihak yang berkepentingan, terutama karena *nine-dash line* China tumpang tindih dengan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEE) di sekitar Kepulauan Natuna yang kaya sumber daya.⁶ Selain itu juga penangkapan ikan oleh kapal-kapal nelayan China di lepas Kepulauan Natuna di tepi selatan LCS telah menjadi masalah serius bagi Indonesia karena mengganggu kedaulatan.⁷ Kasus di LCS ini, merupakan salah satu contoh bahwa permasalahan dan kepentingan negara-negara kawasan Asia memiliki kepentingan maritim yang luas. Permasalahan dan kepentingan ini terkadang melewati dimensi lintas batas negara dan regional.⁸

Selain permasalahan di LCS, Indonesia juga mengalami masalah maritim lainnya. Indonesia merupakan negara yang 2/3 wilayahnya yang merupakan

⁴ Billo Andrew dan Huang Jing. (2015). *Territorial Disputes in the South China Sea*. Palgrave Macmillan. London . Hal. 128.

⁵ *Ibid.*

⁶ Prashanth Parameswaran, *The Truth About China's Indonesia South China Sea Tantrum*, diakses dari <https://thediplomat.com/2017/09/the-truth-about-chinas-indonesia-south-china-sea-tantrum/> pada 26 November 2018

⁷ Keita Ikeda. (2016). *Japan, Indonesia to Set Up Maritime Forum*. The Jakarta Post. Jakarta diakses dari <https://www.thejakartapost.com/news/2016/12/20/japan-indonesia-to-set-up-maritime-forum.html> pada 2 April 2019.

⁸ Joshua H. Ho dan Sam Bateman. (2012). *Maritime Challenges and Priorities in Asia*. Routledge, New York. Hal.1.

wilayah laut. Bagi negara Indonesia, laut adalah rumah bagi berbagai macam sumber daya laut, termasuk perikanan dan lebih dari 50% populasi Indonesia merupakan masyarakat pesisir yang hidupnya bergantung pada sumber daya laut tersebut. Namun laut yang dimiliki Indonesia tidak hanya memberi keuntungan, tetapi juga permasalahan.

Salah satu permasalahan yang sedang dialami Indonesia adalah masalah mengenai *Illegal, Unreported And Unregulated (IUU) Fishing* di Perairan Indonesia. Permasalahan ini tentu saja memberi dampak kerugian bagi Indonesia. Kerugian yang dialami oleh Indonesia sebagai dampak dari tindak kejahatan *IUU Fishing* mencapai nilai hingga 20 milyar US\$ atau sekitar Rp. 20 triliun per tahun, ini belum terhitung dengan kerusakan 65% terumbu karang di Indonesia.⁹

Oleh karena itu, negara Indonesia didorong untuk melakukan kerja sama dalam menyelesaikan berbagai permasalahan tersebut. Dalam Hubungan Internasional, negara diibaratkan seperti seorang manusia, hal ini menandakan bahwa manusia tidak mampu berdiri sendiri sehingga membutuhkan orang lain, begitu juga dengan sebuah negara yang membutuhkan negara lain dalam memenuhi kebutuhannya dan menyelesaikan berbagai permasalahannya.

Kerja sama terjadi tidak hanya di antara individu tetapi juga di antara entitas kolektif, termasuk perusahaan, partai politik, organisasi etnis, kelompok teroris, bahkan negara. Kerjasama antar negara telah dilakukan oleh negara sejak jauh sebelum Thucydides membahas diplomasi, perjanjian, dan aliansi lebih dari dua ribu tahun yang lalu. Kerja sama antar negara sangat penting untuk

⁹ Masyarakat ASEAN. (2016). *Membangun Kiprah Maritim Indonesia di Kawasan*. Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN Kementerian Luar Negeri. Jakarta. Hal. 11.

pemeliharaan *good order at sea* di wilayah laut Indonesia.¹⁰ Penguatan *good order at sea*¹¹ adalah salah satu upaya dalam menyelesaikan berbagai permasalahan maritim di Indonesia.¹²

Salah satu upaya yang telah Indonesia lakukan dalam menyelesaikan permasalahan maritim adalah menjalin kerja sama dalam bidang maritim dengan negara-negara di Asia Tenggara. Melalui *the Association of Southeast Asian Nations* (ASEAN), negara-negara di Asia Tenggara membentuk forum yang membahas mengenai kerja sama regional tentang permasalahan maritim. Forum tersebut adalah *ASEAN Maritime Forum* (AMF) yang dibentuk pada tahun 2010 sebagai forum dialog yang diharapkan dapat membantu memperkuat kerja sama maritim di ASEAN. AMF memiliki tujuan untuk mendorong kerja sama maritim; mengembangkan pemahaman bersama mengenai isu maritim kawasan dan global; serta sebagai bagian dari upaya *Confidence Building Measures* (CBM) and *Preventive Diplomacy* (PD).¹³

Saat ini, AMF lebih fokus pada dua tujuan utama, yaitu untuk membahas isu-isu strategis terkait maritim dan sinergi berbagai kerja sama maritim oleh badan sektoral ASEAN dan *ASEAN Regional Forum* (ARF). AMF diharapkan tidak hanya membahas isu keamanan maritim (*security*

¹⁰Xinyuan Dai, Duncan Snidal, and Michael Sampson. (2017). *International Cooperation Theory and International Institutions*. Internatioan Studies Association and Oxford University Press. diakses dari <http://oxfordre.com> pada 3 Februari 2019.

¹¹*Good order at sea* adalah kebutuhan memastikan keselamatan dan keamanan aktivitas di lautan, dan perizinan negara-negara dalam mendapatkan kepentingan maritim serta mengembangkan sumber daya laut secara berkelanjutan dan secara damai sesuai dengan hukum internasional.

¹² Joshua H. Ho dan Sam Bateman. (2012). *Maritime Challenges and Priorities in Asia*. Routledge, New York. Hal.1.

¹³ Masyarakat ASEAN. (2016). *Membangun Kiprah Maritim Indonesia di Kawasan*. Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN Kementerian Luar Negeri. Jakarta. Hal. 18.

centric), tetapi juga membahas dimensi lain dari isu maritim.¹⁴ AMF memiliki anggota sebanyak 10 negara yaitu Brunei Darussalam, Cambodia, Indonesia, Lao PDR, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam.

Pada perkembangannya, AMF yang awalnya hanya berisi negara anggota ASEAN mengalami penambahan anggota dari *East Asian Summit* (EAS). Setelah mengalami penambahan anggota dari negara-negara EAS maka terbentuklah *Expanded ASEAN Maritime Forum* (EAMF). Namun, terbentuknya EAMF tidak menghilangkan forum sebelumnya yaitu AMF yang tetap berdiri dengan beranggotakan negara-negara ASEAN.

Pembentukan EAMF diawali dengan usulan Jepang untuk membentuk Forum Maritim Asia Timur (*East Asia Maritime Forum*) yang melibatkan negara-negara anggota EAS dan diselenggarakan secara *back-to-back* dengan AMF. Usulan untuk menjalin kerja sama maritim dengan Mitra Wicara juga mengemuka dalam Pertemuan AMF ke-2 di Pattaya, Thailand dan pada KTT ASEAN ke-19 di Bali pada tahun 2011.¹⁵

EAMF pertama kali diselenggarakan di Manila, Filipina pada 5 Oktober 2012. Forum ini mendorong dialog yang melibatkan negara-negara EAS turut berpartisipasi untuk memanfaatkan peluang dan mengatasi tantangan bersama pada isu-isu maritim yang ada pada AMF. Negara anggota pada EAMF yaitu

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ *Ibid.* Hal 20.

sepuluh negara anggota ASEAN, Australia, China, India, Jepang, Selandia Baru, Republik Korea, Russia, dan Amerika Serikat serta Sekretariat ASEAN.¹⁶

Indonesia sudah menjalin kerja sama regional di bidang maritim dengan bergabung di AMF dan EAMF. Selain bergabung di AMF dan EAMF, Indonesia juga mendirikan forum maritim bersama Jepang, yaitu *Japan-Indonesia Maritime Forum*. Jepang merupakan negara yang sudah lama memiliki kerja sama bilateral dengan Indonesia, kerjasama kedua negara ini dimulai sejak tahun 1958 saat hubungan diplomatik Indonesia dan Jepang dimulai. Dari saat itu lahir berbagai kerjasama bilateral antara Indonesia dan Jepang, salah satu bentuk kerja sama terbaru antara Indonesia dan Jepang adalah pembentukan *Japan-Indonesia Maritime Forum*.

Forum ini merupakan forum yang pertama kali dibentuk antara Indonesia dan Jepang guna membahas kerja sama di bidang maritim yang bersifat strategis antara kedua negara. Cakupan kerja sama forum ini meliputi (a) kerja sama di bidang keamanan maritim dan keselamatan laut (b) Pembangunan ekonomi maritim (c) pembangunan infrastruktur maritim dan (d) pendidikan dan pelatihan maritim.¹⁷

Indonesia sudah melakukan berbagai upaya dalam menyelesaikan permasalahan maritim, mulai dari konflik LCS sampai masalah *IUU Fishing*. Salah satu upaya Indonesia dalam menyelesaikan permasalahan maritim adalah

¹⁶ ASEAN. Org. (2012). *Chairman's Statement, 1st Expanded ASEAN Maritime Forum Manila* diakses dari <https://asean.org/1st-expanded-asean-maritime-forum-manila/> pada 3 Februari 2019.

¹⁷ Humas Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman. *Indonesia-Jepang Bentuk Indonesia - Japan Maritime Forum* diakses dari <https://maritim.go.id/indonesia-jepang-bentuk-indonesia-japan-maritime-forum/> pada 02 Desember 2018.

dengan berkerjasama dengan negara lain. Bergabung dengan AMF dan EAMF merupakan bentuk upaya Indonesia bekerjasama dengan negara-negara lain. Bergabungnya Indonesia di AMF dan EAMF ternyata hal ini belum mampu menyelesaikan permasalahan yang ada.

Oleh karena itu, Indonesia melakukan kerja sama dengan Jepang dengan membuat forum bilateral yang fokus pada permasalahan maritim di luar EAMF yaitu, *Japan-Indonesia Maritime Forum*. Forum ini didirikan walaupun Jepang dan Indonesia sama-sama telah bergabung di EAMF. Hal ini menunjukkan bahwa EAMF yang merupakan forum regional belum mampu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh Indonesia dan Jepang. *Japan-Indonesia Maritime Forum* merupakan salah satu bentuk kebijakan luar negeri Indonesia dalam mencapai kepentingan nasionalnya. Indonesia yang memiliki berbagai permasalahan maritim tentu memiliki kepentingan dalam *Japan-Indonesia Maritime Forum*, kepentingan inilah yang akan diteliti oleh penulis dalam penelitian ini.

1.2 Rumusan Masalah

Indonesia tentu memiliki kepentingan yang kuat dalam bekerja sama dibidang maritim dengan Jepang. Walaupun Indonesia dan Jepang telah tergabung dalam forum EAMF yang terdapat Indonesia dan Jepang di dalamnya. Kedua negara ini tetap memilih untuk membentuk hubungan bilateral di bidang maritim diluar EAMF, yaitu dengan membentuk *Japan-Indonesia Maritime Forum*. Oleh karena itu peneliti ini akan membahas mengenai kepentingan apa yang menyebabkan Indonesia menjalin kerja sama bilateral dibidang maritim dengan Jepang. Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti merumuskan dua permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian yaitu :

1. Apa tujuan khusus Kebijakan Luar Negeri Indonesia mengenai *Japan-Indonesia Maritime Forum*?
2. Apa Kepentingan Nasional Indonesia dan Intensitas Kepentingan Nasional Indonesia Terhadap Jepang dalam *Japan-Indonesia Maritime Forum* periode 2017-2018?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui tujuan khusus Kebijakan Luar Negeri Indonesia mengenai *Japan-Indonesia Maritime Forum* periode 2017-2018?
2. Untuk mengetahui Kepentingan Nasional Indonesia dan Intensitas Kepentingan Nasional Indonesia Terhadap Jepang dalam *Japan-Indonesia Maritime Forum* periode 2017-2018?

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat dalam hal teoretis dan praktis yaitu :

1. Manfaat teoretis : Dapat menjadi referensi lebih lanjut bagi peneliti yang akan melanjutkan atau memulai penelitian mengenai Kepentingan Nasional Indonesia terhadap Jepang.
2. Manfaat praktis : Sebagai bahan informasi bagi semua kalangan yang memerlukan, khususnya mahasiswa Hubungan Internasional.

BAB II **TINJAUAN PUSTAKA**

2.1 Penelitian Terdahulu

Penulis menggunakan 4 penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian penulis yang berjudul Kepentingan Nasional Indonesia terhadap Jepang dalam *Japan-Indonesia Maritime Forum* Periode 2017-2018. Penelitian yang **pertama** adalah sebuah jurnal yang berjudul “*An Indonesian Perspective Toward Maritime Vision: Is Pursuing National Interest While Maintaining Neutrality In The South China Sea Possible?*”. Penelitian ini ditulis oleh Masyithoh dan Annisa Ramadhani yang berasal dari The University of Birmingham, Inggris pada tahun 2015. Jenis Penelitian ini adalah kualitatif dan menggunakan studi pustaka sebagai teknik pengumpulan data. Teori atau konsep yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Global Power Projection* dan *National Interest*.

Perebutan wilayah yang tumpang tindih di LCS telah mengubah wilayah ini menjadi zona yang diperebutkan kekuatan global untuk menunjukkan peran di wilayah tersebut. Ketidakpastian politik dalam tatanan internasional, membuat negara lebih memilih *self-help* untuk mencapai kepentingan nasional demi kemakmuran bangsanya. Indonesia, adalah salah satu negara yang berada dekat di LCS, walaupun demikian, Indonesia tidak memiliki wilayah bersengkata di laut ini, sehingga Indonesia bukan negara pengklaim. Negara Indonesia sedang

berusaha memperkuat kerja sama melalui visi maritimnya melalui *Global Maritime Nexus*. Hal Ini bertujuan untuk meningkatkan peluang bersama untuk semua aktor yang terlibat diperselisihkan dengan demikian mengurangi kemungkinan keadaan semakin memburuk.

ASEAN sebagai salah satu dari organisasi multilateral paling menonjol di kawasan ini diharapkan menjadi landasan untuk penyelesaian sengketa yang lebih damai sehingga mampu meningkatkan kemakmuran dan kondisi keamanan negara anggota. Walaupun begitu, Indonesia adalah negara berdaulat yang memiliki kepentingan nasionalnya dalam tatanan internasional. Oleh karena itu menjadi tantangan bagi Indonesia untuk mencapai kepentingan nasionalnya namun tetap menjaga netralitas sebagai negara yang tidak mengklaim pada saat yang sama.

Fokus penelitian ini adalah pengaruh netralitas Indonesia dalam sengketa LCS terhadap pencapaian kepentingan Indonesia sedangkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sengketa LCS merupakan seolah sebuah *test* bagi semua aktor yang terlibat didalamnya; bagi China, sengketa ini mendorong China untuk terus mengandalkan prinsip "*China Peaceful Rise*" tanpa memicu persaingan asertif, sedangkan untuk Amerika Serikat, sengketa ini menguji kehadiran "*U.S. Rebalance to Asia*" tanpa mengganggu ketertiban kawasan, dan yang tak kalah pentingnya, Indonesia berhasil mencapainya kepentingan nasional tanpa terlibat dalam eskalasi konflik .

Penelitian ini menyebutkan bahwa Indonesia telah mampu mencapai kepentingan nasionalnya. Namun dalam penelitian ini tidak dijelaskan secara rinci kepentingan apa saja yang dicapai oleh Indonesia dan upaya apa saja yang dilakukan Indonesia dalam menghadapi permasalahan LCS dengan tetap

mengusung prinsip netralitas. Selain itu penelitian ini juga tidak menjelaskan indikator netralitas Indonesia. Sehingga netralitas Indonesia dalam masalah LCS belum mampu dijelaskan secara jelas dalam penelitian ini.

Pada penelitian ini konsep yang digunakan adalah Konsep Kepentingan Nasional. Konsep ini berguna dalam penelitian penulis untuk menjelaskan kepentingan Indonesia terhadap Jepang dalam *Japan- Indonesia Maritim Forum* 2017-2018. Penelitian ini juga menjelaskan kebijakan-kebijakan luar negeri Indonesia mengenai maritim sehingga akan membantu penulis dalam menganalisa kebijakan luar negeri Indonesia mengenai maritim pada periode 2017-2018.¹⁸

Penelitian yang **kedua** berjudul "*Jokowi's Maritime Axis: Change and Continuity of Indonesia's Role in Indo-Pacific*". Penelitian ini dibuat pada tahun 2015 dan ditulis oleh A. A. Banyu Perwita yang merupakan seorang Professor pada *School of International Relations* di President University dan I Gusti Bagus Dharma Agastia seorang *research assistant* di President University, Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dan dengan teknik studi pustaka. Penelitian ini menjelaskan negara Indonesia yang sedang mengalami masa transisi dan segera mempunyai presiden baru yang akan dilantik. Presiden yang baru membawa janji-janji kebijakan luar negeri dan pertahanan baru untuk Indonesia. Serta mengubah prinsip-prinsip kemaritiman Indonesia sebelumnya dan memberikan pertimbangan baru pada posisi geopolitik Indonesia di Indo-Pasifik. Fokus penelitian ini adalah perubahan dan keberlanjutan peran Indonesia di Indo-Pasifik melalui konsep Poros Maritim Dunia.

¹⁸ Masyithoh dan Annisa Ramadhani. (2015). *An Indonesian Perspective Toward Maritime Vision: Is Pursuing National Interest While Maintaining Neutrality In The South China Sea Possible?*. University Of Birmingham. Birmingham.

Penelitian ini membahas Poros Maritim Dunia, yang merupakan sebuah konsep yang diciptakan oleh Presiden Joko Widodo untuk membuat perubahan kebijakan luar negeri dan pertahanan Indonesia demi mencapai Poros Maritim Dunia. Dalam kebijakan luar negeri, Indonesia diharapkan berkontribusi lebih banyak kepada *Indian Ocean Rim Association (IORA)* sambil mempertahankan sentralitas ASEAN. Pada bidang pertahanan, ada perubahan signifikan dalam prospek pertahanan Indonesia dari berbasis darat menjadi berbasis maritim. Indonesia juga memandang India sebagai mitra keamanan Indonesia untuk mengamankan Samudra Hindia.¹⁹

Penelitian ini belum menjelaskan secara jelas peran apa yang dilakukan Indonesia di wilayah Indo-Pasifik. Selain itu konsep Poros Maritim Dunia belum dijelaskan secara rinci mengenai hubungannya dengan perubahan dan keberlanjutan peran Indonesia di Indo-Pasifik. Saran dalam penelitian ini yaitu Indonesia diharapkan lebih berkontribusi dalam IORA, namun saran ini tidak menjelaskan kontribusi apa yang bisa Indonesia lakukan terhadap IORA.

Penelitian ini melihat Kebijakan Luar Negeri Indonesia di bidang maritim melalui level individu. Joko Widodo sebagai Presiden Indonesia banyak mempengaruhi Kebijakan Luar Negeri Indonesia tentang maritim. Hal ini akan membantu penulis dalam menganalisa Kebijakan Luar Negeri Indonesia terhadap Jepang dalam *Japan-Indonesia Maritime Forum* tahun 2017-2018 berdasarkan pembuatan keputusan level individu.

¹⁹ A. A. Banyu Perwita dan I Gusti Bagus Dharma Agastia. (2015). *Jokowi's Maritime Axis: Change and Continuity of Indonesia's Role in Indo-Pacific*. President University. Jakarta.

Penelitian yang **ketiga** yaitu berasal dari Mahasiswa Hubungan Internasional Universitas Lampung yaitu Chandra Anwar dengan judul “Kepentingan Indonesia Dalam Kerja Sama Militer Indonesia-Rusia Periode 2010-2015”. Penelitian ini mencoba menjelaskan mengenai hubungan kerja sama militer antara Indonesia-Rusia pada periode 2010-2015 dan mengetahui motif dalam kerja sama militer Indonesia-Rusia 2010-2015. Chandra Anwar menggunakan Teori Kebijakan Luar Negeri, Pembuat Keputusan Kebijakan Luar Negeri, dan Konsep Kepentingan Nasional. Jenis penelitian yang digunakan yaitu kualitatif dan teknik pengumpulan data studi pustaka. Hasil dari penelitian studi pustaka ini menunjukkan bahwa berjalannya hubungan kerja sama militer Indonesia-Rusia pada periode 2010-2015 secara baik antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Rusia dalam menjalin komunikasi.

Indonesia dan Russia melakukan pembelian persenjataan, pertemuan dalam pembahasan *maintenance*, *repair*, *overhaul*, dan latihan gabungan pada periode 2010-2015. Berdasarkan kelima aspek yang mempengaruhi pengambilan keputusan kebijakan luar negeri setiap aspek mempunyai kontribusi tersendiri dalam pengambilan keputusan. Dibandingkan dengan aspek lainya, aspek birokratik mempunyai peranan yang lebih besar, hal ini dapat dilihat pada Kementerian Pertahanan Indonesia sebagai badan yang bertanggung jawab untuk pelaksana dan persetujuan kerja sama militer.

Motif Indonesia dalam menjalin kerja sama antara dengan Rusia pada periode 2010-2015 yaitu untuk mencapai kepentingan pertahanan. Hal tersebut terbukti melalui buku putih, strategi pertahanan Indonesia dan doktrin pertahanan yang menunjukkan bahwa terdapat ancaman eksternal maupun internal yang dapat

membahayakan kedaulatan Indonesia. Ancaman tersebut mendorong Indonesia untuk memperkuat unsur-unsur pertahanan militer dan pertahanan nirmiliter. Dalam memaksimalkan strategi dan doktrin Indonesia hal tersebut perlu didorong dengan kekuatan militer yang superior dan modern.²⁰

Pada penelitian konsep yang dipakai adalah Konsep Kepentingan Nasional oleh Donald E. Nuechterlein, yaitu : *defence interests, economic interests world order interests* dan *ideological interests*. Konsep ini kurang tepat digunakan dalam penelitian ini karena hanya *defence interest* yang paling banyak digunakan dalam menjelaskan kerja sama militer Indonesia dan Russia. Sedangkan indikator lain hanya seolah pelengkap saja. Seharusnya indikator-indikator ini mampu menjelaskan secara jelas kerja sama militer Indonesia dan Russia.

Konsep dan teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu, Teori Kebijakan Luar Negeri, Pembuat Keputusan Kebijakan Luar Negeri, Dan Konsep Kepentingan Nasional. Konsep dan teori ini, adalah konsep dan teori yang akan digunakan penulis dalam menganalisa motif kerja sama Indonesia dengan Jepang dalam *Japan-Indonesia Maritime Forum* periode 2017-2018. Konsep dan teori ini digunakan oleh penulis karena tujuan dan obyek penelitian sebelumnya memiliki beberapa kesamaan yaitu sama-sama menganalisa kepentingan suatu negara terhadap negara lain dan obyek yang dikaji adalah kerja sama antar negara.

Penelitian yang **keempat**, adalah penelitian yang dibuat oleh Okki Rilo Nainggolan yang merupakan seorang mahasiswa Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau. Penelitian

²⁰ Chandra Anwar. (2015). *Kepentingan Indonesia Dalam Kerja Sama Militer Indonesia-Rusia Periode 2010-2015*. Universitas Lampung. Bandar Lampung.

Okki berjudul “Kepentingan Indonesia bekerja sama dengan Jepang dalam bidang Pertahanan Tahun 2015 ”. Penelitian ini dibuat pada tahun 2017 dan bertujuan untuk menjelaskan kepentingan Indonesia dalam kerja sama dengan Jepang di bidang pertahanan pada tahun 2015. Kesepakatan tersebut dituangkan dalam Nota Kesepahaman tentang kerja sama dan pertukaran di bidang pertahanan pada 23 Maret 2015 di Jepang. Perjanjian tersebut ditandatangani oleh Menteri Pertahanan Republik Indonesia Ryamizard Ryacudu dan Menteri Pertahanan Jepang Jenderal Nakatani .

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan Konsep Kepentingan Nasional dan Teori Model Strategis Kebijakan Luar Negeri / Model Rasional dan Teori Kerja sama Internasional oleh Kalevi Jaako Holsti. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif yang berupaya mengungkapkan esensi dari fenomena sosial dengan menganalisis fenomena berdasarkan teori dan data yang ada. Hasil dari penelitian ini adalah kerja sama antara Indonesia dan Jepang di bidang pertahanan pada tahun 2015 bertujuan untuk memenuhi kebutuhan Indonesia dalam meningkatkan bidang pertahanan dalam hal kualitas dan kuantitas melalui modernisasi peralatan pertahanan Indonesia, transfer teknologi, pertukaran informasi tentang masalah pertahanan, pertukaran dan pelatihan personil, dan para ahli, dan bentuk-bentuk lainnya dan pemenuhan *Minimum Essential Force Phase II* dapat dipenuhi secara maksimal. Keinginan Indonesia untuk menjadi Poros Maritim Dunia juga semakin terwujud dan membuat industri pertahanan Indonesia lebih mandiri dengan kerja sama.²¹

²¹ Okki Rilo Nainggolan. (2017). *Kepentingan Indonesia bekerja sama dengan Jepang dalam bidang Pertahanan Tahun 2015*. Universitas Riau. Pekanbaru.

Penelitian ini mampu menjelaskan secara jelas Kepentingan Nasional Indonesia terhadap Jepang dalam bidang pertahanan. Namun pada penelitian ini Teori Model Strategis Kebijakan Luar Negeri / Model Rasional belum digunakan secara jelas dalam menjelaskan Kebijakan Luar Negeri Indonesia dalam bekerja sama dengan Jepang dalam bidang pertahanan. Selain itu *Minimum Essential Force Phase II* juga tidak dijelaskan dalam penelitian sehingga pembaca awam akan bingung dengan istilah ini. Seharusnya penulis menjelaskan terlebih dahulu istilah *Minimum Essential Force Phase II*, lalu baru hubungkan dengan hasil penelitian.

Pada penelitian keempat ini, konsep kepentingan nasional akan membantu penulis dalam menganalisa secara rinci motif Kebijakan Luar Negeri Indonesia dalam bekerja sama dengan Jepang dalam *Japan-Indonesia Maritime Forum* tahun 2017-2018. Selain itu pada penelitian ini negara yang menjadi mitra Indonesia dalam bekerja sama adalah Jepang, sehingga penulis mampu mendapatkan info terkait kerja sama antara Indonesia dan Jepang sebelum *Japan - Indonesia Maritime Forum* didirikan.

Untuk mempermudah melihat kesamaan dan perbedaan dari penelitian terdahulu dan penelitian ini, berikut tabel yang akan memperlihatkan kesamaan dan perbedaan topik penelitian, jenis penelitian, objek penelitian, teori dan konsep serta kesimpulan yang disajikan dalam Tabel 1.1

Tabel 1.1. Perbandingan Penelitian Terdahulu

Penelitian Terdahulu	Masyithoh-Annisa Ramadhani (2015)	Dharma Agastia dan A. Banyu P (2015)	Chandra Anwar (2017)	Okki Rilo Nainggolan (2017)	Chandra Adityas Ramadhan
Topik Penelitian	<i>An Indonesian Perspective Toward Maritime Vision: Is Pursuing National Interest While Maintaining Neutrality In The South China Sea Possible?</i>	<i>Jokowi's Maritime Axis: Change and Continuity of Indonesia's Role in Indo-Pacific</i>	Kepentingan Indonesia Dalam Kerja Sama Militer Indonesia-Rusia Periode 2010-2015	Kepentingan Indonesia bekerja sama dengan Jepang dalam bidang Pertahanan Tahun 2015	Kepentingan Nasional Indonesia Terhadap Jepang Dalam <i>Japan-Indonesia Maritime Forum</i> Periode 2017 - 2018
Jenis Penelitian	Kualitatif	Kualitatif	Kualitatif	Kualitatif	Kualitatif
Objek Penelitian	Pengaruh Netralitas Indonesia dalam sengketa LCS terhadap pencapaian kepentingan Indonesia.	Perubahan dan keberlanjutan peran Indonesia di Indo-Pasifik	Hubungan kerja sama militer antara Indonesia-Rusia pada periode 2010-2015 dan mengetahui motif dalam kerja sama militer Indonesia-Rusia 2010-2015	Kepentingan Indonesia dalam kerja sama dengan Jepang di bidang pertahanan pada tahun 2015	Kepentingan Indonesia dalam menjalin kerja sama maritim dengan Jepang melalui <i>Japan-Indonesia Maritime Forum</i> periode 2016-2018.
Teori dan Konsep	<i>Global Power Projection dan National Interest.</i>	Poros Maritim	Teori Kebijakan Luar Negeri, Pembuat Keputusan Kebijakan Luar Negeri, Dan Konsep Kepentingan Nasional	Konsep kepentingan nasional dan teori model strategis kebijakan luar negeri / model rasional dan teori kerja sama internasional	Teori Kebijakan Luar Negeri, Pembuat Keputusan Kebijakan Luar Negeri, Dan Konsep Kepentingan Nasional
Kesimpulan	Sengketa LCS mendorong China untuk terus mengadopsi prinsip " <i>China Peaceful Rise</i> ", Amerika Serikat, menguji kehadiran " <i>U.S. Rebalance to Asia</i> " Indonesia berhasil mencapainya kepentingan nasional tanpa terlibat dalam eskalasi konflik.	Pada bidang pertahanan, ada perubahan signifikan dalam prospek pertahanan Indonesia dari berbasis darat menjadi berbasis maritim. Indonesia juga memandang India sebagai mitra keamanan Indonesia untuk mengamankan Samudra Hindia.	Indonesia memiliki motif dalam menjalin kerja sama antara Indonesia-Rusia pada periode 2010-2015 yaitu untuk mencapai kepentingan pertahanan.	Kerja sama antara Indonesia dan Jepang di bidang pertahanan pada tahun 2015 bertujuan untuk memenuhi kebutuhan Indonesia dalam meningkatkan bidang pertahanan dalam hal kualitas dan kuantitas	

Sumber : diolah oleh peneliti

2.2. Landasan Analitis

Landasan Konseptual yang dipakai dalam penelitian ini adalah Konsep Kepentingan Nasional dan Teori Kebijakan Luar Negeri

2.2.1 Konsep Kepentingan Nasional

Dalam diskursus politik internasional, konsep kepentingan nasional dapat digunakan di dua hal berbeda. Pertama, kepentingan nasional digunakan sebagai *shape political behaviour* (pembentukan perilaku politik), sebagai cara untuk mempertahankan, menentang atau mengajukan kebijakan-kebijakan politik. Kedua, kepentingan nasional digunakan oleh para mahasiswa hubungan internasional sebagai alat analisis untuk mendeskripsikan, menjelaskan dan menilai kelayakan kebijakan luar negeri suatu negara.²⁰ Kepentingan Nasional merupakan dasar utama suatu negara dalam menentukan kebijakan luar negeri. Sebagai aktor utama dalam pengambilan keputusan, negara selalu dituntut mengambil keputusan sesuai dengan kepentingan negaranya. Morgenthau menyatakan bahwa kepentingan nasional setiap negara adalah mengejar kekuasaan, yaitu apa saja yang bisa membentuk dan mempertahankan pengendalian suatu negara atas negara lain. Hubungan kekuasaan atau pengendalian ini bisa diciptakan melalui teknik-teknik paksaan maupun kerja sama.²¹

Sedangkan Donald E. Nuechterlein mendefinisikan kepentingan nasional sebagai kebutuhan dan keinginan suatu negara berdaulat untuk berhubungan

²⁰ Scott Burchill. (2005). *The National Interest in International Relations Theory*. Palgrave Macmillan. New York. Hal. 23.

²¹ Mohtar Mas'oeed. (1994). *Ilmu Hubungan Internasional Disiplin dan Metodologi*. Pustaka LP3ES Indonesia. Jakarta. Hal. 140.

dengan negara berdaulat lainnya yang berdasarkan pertimbangan lingkungan eksternal. Definisi ini memberikan gambaran perbedaan antara lingkungan eksternal dan internal suatu negara, lingkungan internal dimaknai sebagai kepentingan umum masyarakat suatu negara sedangkan lingkungan eksternal adalah pengaruh dari sistem internasional. Donald juga mengungkapkan bahwa kepentingan suatu negara-bangsa berarti kepentingan keseluruhan masyarakat dan bukan hanya kepentingan kelompok dan para elite politik.²²

Menurut Nuechterlein terdapat 4 dasar kepentingan nasional dibagi sebagai berikut :

(i) *Defence interests* (kepentingan pertahanan), yaitu : kepentingan untuk memberikan perlindungan kepada warga negara, wilayah serta ancaman kekerasan fisik yang berasal dari negara lain dan ancaman eksternal terhadap sistem pemerintahan.

(ii) *Economic interests* (kepentingan ekonomi), yakni : kepentingan negara dalam menjalin hubungan ekonomi yang baik dengan negara lain demi peningkatan kesejahteraan.

(iii) *World Order interests* (kepentingan tatanan dunia) adalah kepentingan mempertahankan kestabilan sistem politik internasional dan sistem ekonomi internasional yang memberikan keuntungan bagi negara.

(iv) *Ideological interests* (kepentingan ideologi), yaitu : kepentingan ideologi adalah kepentingan untuk mempertahankan atau melindungi seperangkat

²² Donald E Nuechterlein. (1976). *National Interests and Foreign Policy: A Conceptual Framework for Analysis and Decision-Making*. British Journal of International Studies. Vol 2.

nilai-nilai yang dipercayai oleh suatu bangsa dan dipahami sebagai nilai-nilai universal.

Kemudian masing-masing dasar kepentingan nasional diatas akan dianalisis intensitas kepentingannya. Penting untuk menentukan seakurat mungkin intensitas kepentingan suatu negara terhadap suatu isu internasional, karena pemerintah suatu negara mungkin khawatir tentang suatu peristiwa di negara lain. Intensitas dimaknai sebagai kualitas hubungan antar negara yang dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya: jarak dari perbatasan, komposisi pemerintah yang bersangkutan, jumlah perdagangan yang dilakukan, hubungan historis antar negara, dan lainnya.²³ Dengan menganalisis intensitas kepentingan suatu negara maka suatu negara akan mampu merespon isu internasional tersebut dengan sebaik mungkin sehingga tidak merugikan negara. Proses ini memengaruhi hitung-rugi pada empat kepentingan dasar yang diuraikan di atas. Untuk menganalisis proses penentuan intensitas maka digunakan 4 indikator dibawah ini²⁴ :

1. *Survival issues*: : ketika kelangsungan hidup suatu negara dalam bahaya, akibat dari serangan militer ke wilayahnya atau terdapat ancaman penyerangan dari musuh. Dalam mengidentifikasi intensitas suatu kepentingan termasuk dalam *survival issues* harus memenuhi beberapa indikator yaitu. : ancumannya bersifat langsung dan nyata dan diperkirakan mampu menghancurkan negara lain. Berdasarkan definisi di atas maka, intentitas *survival issues* hanya berlaku pada kepentingan

²³ *Ibid.*

²⁴ *Ibid.*

pertahanan dan tidak berlaku pada kepentingan ekonomi, tatanan dunia dan ideologi.

2. *Vital issues* : Ditandai dengan penggunaan kekuatan militer konvensional untuk mencegah serangan negara lain atau digunakan sebagai gertakan untuk mencegah konflik. Dalam jangka yang panjang *vital issues* dapat mengancam, politik dan ekonomi suatu negara. Hal ini sama seperti *survival issues*, namun pada *vital issues* negara masih memiliki waktu untuk mencari bantuan kepada negara lain dan bernegosiasi untuk menyelesaikan masalah atau bahkan mengancam akan menyerang jika ancaman serangan dari negara lain tidak ditarik. Tidak seperti *survival issues*, *vital issues* tidak hanya tentang masalah pertahanan saja, tetapi juga ekonomi, tatanan dunia (aliansi dan prestise nasional) dan di beberapa kasus juga mengenai masalah ideologi.
3. *Major issues*: ketika politik, ekonomi dan ideologis negara dapat dipengaruhi oleh peristiwa dan trend pada dunia internasional dan karenanya memerlukan tindakan untuk mencegah ancaman sehingga tidak menjadi *vital issues*. Sebagian besar masalah dalam hubungan internasional termasuk dalam kategori ini dan biasanya diselesaikan melalui negosiasi diplomatik. Sebagian besar masalah ekonomi antara negara adalah termasuk *major issues* dan bukan *vital issues*.
4. *Peripheral issues* : Ketika kesejahteraan negara tidak dipengaruhi oleh peristiwa atau tren di luar negeri, tetapi kepentingan pribadi warga dan perusahaan yang beroperasi di negara lain mungkin terancam. Perusahaan multinasional biasanya lebih dilindungi oleh negara asalnya dibandingkan

kepentingan pribadi warga negara tersebut. Hal ini karena pendapatan dan pajak perusahaan multinasional memiliki pengaruh signifikan terhadap kesejahteraan ekonomi negara-negara tersebut.

Penulis menyimpulkan bahwa kepentingan nasional dimaknai sebagai kepentingan keseluruhan lapisan masyarakat dalam suatu negara yang dapat dicapai oleh negara dengan cara paksaan atau kerja sama dengan negara lain demi terpenuhinya kepentingan negara untuk mewujudkan negara yang sejahtera. Kepentingan nasional merupakan dasar dari suatu negara dalam membuat kebijakan luar negerinya. Pada penelitian ini konsep kepentingan nasional digunakan untuk menjelaskan Kepentingan Nasional Indonesia terhadap Jepang dalam *Japan-Indonesia Maritime Forum* pada tahun 2017-2018 melalui 4 kepentingan yaitu : kepentingan pertahanan, kepentingan ekonomi, kepentingan tatanan dunia, dan kepentingan ideologi yang kemudian masing-masing dasar kepentingan nasional tersebut akan dianalisis intensitas kepentingannya melalui indikator yang dikemukakan oleh Donald E. Nuechterlein, yaitu *survival issues*, *vital issues*, *major issues*, dan *peripheral issues*.

2.2.2 Teori Kebijakan Luar Negeri

K.J Holsti mendefinisikan kebijakan luar negeri sebagai tindakan atau gagasan, yang dirancang oleh pembuat kebijakan untuk memecahkan masalah atau mempromosikan suatu perubahan dalam lingkungan, yaitu dalam kebijakan, sikap atau tindakan negara lain.²⁵ Sedangkan menurut P. Anthonius Sitepu, kebijakan luar negeri adalah keseluruhan perjalanan keputusan pemerintah untuk

²⁵ K.J. Holsti.(1988). *Politik Internasional Kerangka Untuk Analisis*. Penerbit Airlangga Jakarta. Hal. 136

mengatur semua hubungan dengan negara lain. Kebijakan luar negeri adalah pola perilaku yang diwujudkan oleh suatu negara ketika berjuang untuk mendapatkan kepentingan nasionalnya dalam hubungannya dengan negara lain.²⁶

P. Anthonius Sitepu juga menambahkan bahwa kebijakan luar negeri adalah suatu tindakan yang diambil dalam hubungannya dengan situasi/aktor yang ada di luar batas-batas wilayah negara. Kebijakan luar negeri merupakan manifestasi utama dari perilaku negara dalam hubungannya dengan negara lain, sehingga timbulah interaksi antar negara.²⁷ Kemudian Robert Jackson dan Georg Sorensen memaknai kebijakan luar negeri sebagai tujuan-tujuan dan tindakan-tindakan yang dimaksudkan untuk memandu keputusan dan tindakan pemerintah menyangkut urusan-urusan eksternal, terutama hubungan dengan negara lain.²⁸ Kesimpulannya, kebijakan luar negeri adalah tindakan dan upaya suatu negara dalam hubungannya dengan negara lain untuk mencapai kepentingan nasionalnya.

Berdasarkan beberapa definisi kebijakan luar negeri yang dikemukakan oleh para ahli di atas terdapat tujuan khusus suatu negara dalam membuat kebijakan luar negerinya. K.J . Holsti berpendapat bahwa terdapat tiga kategori tujuan dalam kebijakan luar negeri yaitu : tujuan inti, tujuan jangka menengah dan tujuan jangka panjang. Tujuan inti dari kebijakan luar negeri adalah menjamin kedaulatan dan kemerdekaan wilayah nasional dan mengekalkan sistem politik, sosial dan ekonomi tertentu berdasarkan wilayah itu.²⁹

²⁶ P. Anthonius Sitepu. (2011). *Studi Hubungan Internasional*. Graha Ilmu. Yogyakarta. Hal. 177.

²⁷ *Ibid.* Hal. 178

²⁸ Georg Sorensen Dan Robert Jackson.(2013). *Introduction To International Relations Theories And Approaches Fifth Edition*. Oxford University Press Inc. New York. Hal. 262.

²⁹ K.J. Holsti.(1988). *Politik Internasional Kerangka Untuk Analisis*. Penerbit Airlangga Jakarta. Hal. 142.

Selanjutnya yaitu tujuan jangka menengah, kategori ini kemudian dibagi menjadi tiga tipe. **Tipe pertama** yaitu mencakup usaha pemerintah memenuhi tuntutan dan kebutuhan perbaikan ekonomi melalui tindakan internasional. Kesejahteraan sosial dan pembangunan ekonomi merupakan tujuan utama dari pemerintahan suatu negara. Namun hal ini sulit dicapai karena terbatasnya sumber daya, jasa administrasi dan keterampilan teknis, hal ini mendorong negara untuk berinteraksi dengan negara lain. Bagi sebagian negara, perdagangan, bantuan luar negeri, akses fasilitas komunikasi, sumber perbekalan dan pasar luar negeri adalah hal penting yang berguna untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.³⁰ **Tipe kedua** tujuan jangka menengah adalah meningkatkan prestise negara dalam sistem. Prestise diukur dengan tingkat perkembangan industri dan keterampilan ilmiah serta teknologi. Negara besar dapat meningkatkan prestisenya melalui sejumlah kebijakan dan tindakan, termasuk ekspansi kemampuan militer, pemberian bantuan luar negeri dan melalui jalur diplomatik.

Tipe ketiga tujuan jangka menengah mencakup banyak bentuk perluasan diri atau imperialisme. Negara melakukan perluasan wilayah, walaupun wilayah tersebut tidak memiliki kepentingan strategis, ekonomi dan sosial.³¹ Kategori yang terakhir yaitu tujuan jangka panjang, tujuan ini berisi rencana, impian dan pandangan mengenai organisasi politik atau ideologi terakhir sistem internasional, aturan yang mengatur hubungan dalam sistem itu dan peran negara tertentu di dalamnya.³²

³⁰ *Ibid.* Hal. 145.

³¹ *Ibid.* Hal. 146.

³² *Ibid.* Hal. 147.

Melalui penggunaan teori kebijakan luar negeri tersebut maka peneliti akan melihat apa tujuan khusus kebijakan luar negeri Indonesia terhadap Jepang dalam *Japan-Indonesia Maritime Forum* pada tahun 2017-2018.

2.3 Kerangka Analitis

Indonesia telah bergabung dengan AMF sebagai forum yang membahas tentang berbagai permasalahan maritim di ASEAN, Indonesia juga turut bergabung dalam EAMF yang terdapat Jepang di dalamnya. Walaupun Indonesia dan Jepang sudah sama-sama bergabung di EAMF, tetapi kedua negara ini membangun kerja sama bilateral tentang maritim melalui pembentukan *Indonesia –Japan Maritime Forum*. Untuk mempermudah dalam menjawab pertanyaan penelitian, maka berikut merupakan kerangka pemikiran dalam penelitian ini.



Gambar 1.2. Kerangka Pemikiran

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Tipe Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan tipe penelitian kualitatif. Tipe penelitian kualitatif merupakan tipe penelitian yang menitikberatkan penelitian analisis pada pemahaman atas kata-kata atau kalimat yang ada untuk membuktikan fenomena yang terjadi.³³ Sedangkan Creswell mendefinisikan metode penelitian kualitatif, sebagai suatu pendekatan atau penelusuran untuk mengeksplorasi dan memahami suatu gejala sentral.³⁴

Menurut Charmaz penelitian kualitatif tidak selalu merupakan penelitian yang berfungsi sebagai pembangun teori atau generalisasi teori. Namun, teori dapat digunakan sebagai alat untuk penyelidikan lebih dalam untuk mendapatkan jawaban.³⁵ Adapun karakteristik penelitian kualitatif adalah: (1) memiliki prinsip alur berpikir induktif dan berusaha mencari regenerasi atas teori yang ada; (2) menekankan pada cara individu menginterpretasikan dunia sosial mereka; dan (3) mempertimbangkan keadaan sosial manusia sebagai ciptaan.³⁶

³³ Audie Klotz dan Deepa Prakash. (2008). *Qualitative Methods in International Relations A Pluralist Guide*. Palgrave Macmillan. New York. Hal.3

³⁴ John W. Creswell dalam buku Dr. J. R. Raco, Me., M.Sc. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik, Dan Keunggulannya*. PT Gramedia Widiasarana Indonesia. Jakarta.

³⁵ Alan Bryman. (2012). *Social Research Methods 4th Edition*. Oxford University Press. New York. Hal. 27.

³⁶ *Ibid.* Hal. 36.

Metode kualitatif lebih menekankan aspek pencarian makna dibalik kenyataan empiris dari realitas sosial yang ada sehingga pemahaman yang mendalam akan realitas sosial tersebut dapat tercapai. Pada akhirnya penelitian kualitatif menjadi lebih mudah dipahami sebagai metode yang datanya dapat berupa pernyataan-pernyataan dan data yang dihasilkan pun berupa data deskriptif mengenai subjek yang diteliti, yaitu kata-kata baik tertulis maupun lisan.³⁷ Metode kualitatif sesuai dengan penelitian penulis karena penelitian ini akan mencari makna dibalik hubungan kerja sama Indonesia dan Jepang dalam *Japan–Indonesia Maritime Forum* pada tahun 2017-2018.

3.2 Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus kepada tujuan khusus kebijakan luar negeri Indonesia mengenai *Japan–Indonesia Maritime Forum* serta Kepentingan Indonesia terhadap Jepang dalam *Japan–Indonesia Maritime Forum* pada tahun 2017 - 2018. Adapun fokus pada kepentingan nasional Indonesia terhadap Jepang akan dilihat melalui empat indikator seperti yang dikemukakan oleh Donald E. Nuechterlein, yaitu : kepentingan pertahanan, kepentingan ekonomi, kepentingan tatanan dunia, kepentingan ideologi. Selanjutnya keempat kepentingan tersebut akan dianalisa intensitasnya yang terdiri dari empat indikator yaitu : *survival issues, vital issues, major issues dan peripheral issues*.

³⁷ Matthew Miles dan Michael Huberman. (1992) *Analisis Data Kualitatif*. Universitas Indonesia Press. Jakarta. Hal 15.

3.3. Jenis Dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data sekunder. Adapun data yang dicari merupakan data dari tahun 2017-2018 mengenai Kebijakan Luar Negeri Indonesia dan Kepentingan Indonesia dalam *Japan-Indonesia Maritime Forum*. Peneliti memperoleh data tersebut melalui sumber-sumber baik berupa jurnal-jurnal ilmiah, buku, laporan tertulis, situs internet dan dokumen-dokumen berkaitan dengan objek penelitian.³⁸

Adapun sumber-sumber data tersebut seperti, *Japan- Indonesia Joint Statement on Strengthening Strategic Partnership, The Joint Press Release by the Ministry of Foreign Affairs of Japan and Coordinating Ministry of Maritime Affairs of the Republic of Indonesia*, Situs Kementerian Luar Negeri Jepang yaitu www.mofa.go.jp dan situs Kementerian Luar Negeri Indonesia yaitu [www.kemlu.go.id.](http://www.kemlu.go.id), serta situs Kementerian Koordinator Bidang Kematriman Indonesia yaitu www.maritim.go.id.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data penelitian ini adalah dengan cara studi pustaka yang mendukung mendapatkan data sekunder. Studi pustaka adalah teknik pengumpulan data yang menelaah literatur yang berasal dari buku fisik maupun non-fisik berdasarkan tema dengan kasus yang spesifik atau berdasarkan kronologi kejadian.³⁹ Melalui studi pustaka data yang didapatkan akan cenderung lebih

³⁸ Suryadi U. Bakry. (2016). *Metode Penelitian Hubungan Internasional*. Pustaka Pelajar. Hal.17.

³⁹ Earl Babbie. (2014). *The Basics of Social Research*. Wadsworth, Cengage Learning .Wadsworth. Hal. 490-496.

spesifik dan informasi yang didapat lebih jelas. Selain itu, penulis juga mengumpulkan data melalui internet sehingga mendapatkan data yang lebih terbaru.

3.5 Teknik Validitas Data

Agar didapatkan penelitian yang memiliki validitas, maka dibutuhkan triangulasi. Triangulasi adalah metode yang digunakan peneliti kualitatif untuk memeriksa dan menetapkan validitas dalam penelitian. Terdapat 5 triangulasi yang dikemukakan oleh Lisa A. Guion , yaitu *data triangulation, investigator triangulation, theory triangulation, methodological triangulation, and environmental triangulation*. Triangulasi yang dipakai dalam penelitian ini adalah *data triangulation* , triangulasi ini dilakukan dengan cara pencocokan data dengan sumber sah lainnya. Penulis melakukan pencocokan kesimpulan pada setiap indikator dengan data dari dokumen dan teori yang telah teruji validitasnya.⁴⁰

3.6 Teknik Analisis Data

Berdasarkan metode studi pustaka yang digunakan peneliti, maka analisis data yang akan digunakan oleh peneliti adalah teknik analisis data model Miles dan Huberman⁴¹, yaitu :

⁴⁰ Lisa A. Guion. (2002). *Triangulation: Establishing the Validity of Qualitative Studies*. University of Florida . Florida. Hal. 1.

⁴¹ Sugiyono (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.Bandung. Hal. 247-249.

a. Data reduction (Reduksi data)

Reduksi data adalah proses pemilihan, pemfokusan, penyederhanaan, abstraksi, dan pertransformasian data mentah yang nantinya akan dikumpulkan sehingga membentuk data kompleks yang kemudian dapat digunakan untuk mengidentifikasi gap, memunculkan ide baru, dan mengembangkan hipotesis agar tidak bias.

b. Data display (Penyajian data)

Penyajian data ditujukan untuk mempermudah peneliti untuk dapat melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari data penelitian.

c. Conclusion drawing / Verification (Penarikan kesimpulan / Verifikasi)

Verifikasi atau penarikan kesimpulan adalah tahap terakhir dalam analisis data ini adalah. Pada tahap verifikasi ini data-data yang didapat dari studi kepustakaan akan direduksi dan disajikan, setelah itu ditarik kesimpulannya sehingga mampu menjawab rumusan masalah pada penelitian ini.

BAB IV GAMBARAN UMUM

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai Gambaran Umum Indonesia, Hubungan Bilateral Indonesia-Jepang dan *Japan-Indonesia Maritime Forum*. Pada Sub-bab Gambaran Umum Indonesia menjelaskan tentang posisi negara Indonesia dan keuntungan serta tantangan yang dihadapi sebagai negara kepulauan. Selanjutnya pada Sub-bab Hubungan Bilateral Indonesia Jepang dijelaskan mengenai awal mula hubungan Indonesia dan Jepang, kerja sama yang telah terjalin di kedua negara. Sub-bab terakhir yaitu *Japan-Indonesia Maritime Forum* menjelaskan tentang isi forum tersebut, faktor pendukung kerja sama, dan proses pendiriannya.

4.1 Gambaran Umum Indonesia

Berdasarkan Undang - Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 25 A dikatakan bahwa *Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah Negara Kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang*. Hal ini didasari dengan fakta bahwa Indonesia adalah sebuah negara kepulauan terbesar di dunia yang terletak di kawasan tropis dan dilewati oleh garis khatulistiwa. Luas laut Indonesia mencapai 5,8 Juta km² (yang terdiri dari 3,1 juta km² perairan teritorial dan 2,7 juta km² perairan ZEE). Luas wilayah laut Indonesia mencapai lebih 70% dari

seluruh wilayah Indonesia dan memiliki pulau sebanyak 17.504 dan garis pantai sepanjang 99.000 km dengan penduduk lebih dari 220 juta.⁴²

Selain itu secara geografis Negara Kesatuan Republik Indonesia terletak di antara Benua Asia dan Benua Australia dan diapit oleh dua samudra besar yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Hal ini menempatkan Indonesia pada posisi strategis karena berada pada lalu lintas perdagangan laut dunia. Menyadari posisi strategis ini, Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla menyakini bahwa Indonesia dapat menjadi Poros Maritim Dunia apabila pemanfaatnya dikelola dengan benar. Posisi Indonesia sebagai sebuah Benua Maritim dan Negara Kepulauan yang utuh merupakan perwujudan dari semangat Deklarasi Juanda pada 13 Desember 1957. Deklarasi Juanda menyatakan dengan tegas bahwa:

- a. Indonesia adalah negara kepulauan dengan corak tersendiri
- b. Kepulauan Nusantara adalah sebuah kesatuan karenanya laut sekitar, di antara dan di dalam kepulauan Indonesia adalah satu kesatuan wilayah NKRI.
- c. Ordonansi Hindia Belanda tahun 1939 (*Teritoriale Zeeën en Maritieme Kringen Ordonantie - TZMKO 1939*) dapat memecah belah kesatuan NKRI.⁴³

Letak geografis Indonesia tidak hanya penting dalam konteks perdagangan internasional namun juga menjadikan sumber daya hayati di Indonesia menjadi beragam dan memiliki karakteristik yang khusus. Wilayah laut Indonesia terutama bagian Timur, berada pada pusat segitiga karang dunia (*coral triangle*) dan karena

⁴² Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman. (2018). *Laporan Kinerja Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Tahun 2017*. Jakarta. Hal. 3

⁴³ Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman. (2017). *Laporan Tahunan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Tahun 2016*. Jakarta. Hal. 5.

kekhasan letak geografis dan iklim tersebut, perairan Indonesia dihuni oleh berbagai macam spesies ikan dan jenis karang keras dan lunak serta hutan bakau dan padang lamun yang kaya. Terdapat kurang lebih 76 % jenis ikan di dunia dan 600 spesies karang hidup di perairan Indonesia. Selain itu, perairan Indonesia juga didiami oleh lebih dari 2500 spesies atau 37% dari jenis ikan karang dunia. Perairan Indonesia juga adalah habitat dari berbagai jenis mamalia laut antara lain paus, penyu, dugong, dan lumba-lumba.⁴⁴

Namun dengan posisi strategis dan potensi kekaayaan alam Indonesia ini, malah belum memberikan dampak maksimal bagi kemajuan Indonesia dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla sadar akan potensi maritim Indonesia, agar Indonesia mampu meraih kembali kejayaan maritim. Untuk mewujudkan hal ini maka dalam Kabinet Kerja dibuatlah Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman (Kemenko Maritim), kementerian ini dibuat untuk mengefektifkan sinkronisasi dan koordinasi pembangunan di bidang kemaritiman sehingga dapat terjadi sinergi diantara kementerian/lembaga yang dikoordinasikan untuk mengurangi dan/atau menghilangkan hambatan-hambatan yang ada.⁴⁵

Berdasarkan Peraturan Presiden No. 10 tahun 2015 tentang Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, dinyatakan bahwa Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan Kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan bidang kemaritiman. Selanjutnya dinyatakan bahwa Kemenko

⁴⁴ *Ibid.*

⁴⁵ *Ibid.* Hal. 6

Bidang Kemaritiman mengkoordinasikan beberapa kementerian antara lain: Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Perhubungan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pariwisata, Kementerian dan Instansi lain yang dianggap perlu.⁴⁶

4.2 Hubungan Bilateral Indonesia-Jepang

Hubungan diplomatik Indonesia dan Jepang di buka pada bulan April 1958 dengan Penandatanganan Perjanjian Perdamaian antara Jepang dan Republik Indonesia. Pada tahun tersebut juga ditandatangani Perjanjian Pampasan Perang. Sedangkan untuk pembukaan jalur penerbangan antara Jepang dan Indonesia diadakan pada tahun 1963. Sampai saat ini terdapat 19.312 Warga Negara Jepang yang tinggal di Indonesia berdasarkan pada data bulan Oktober 2016 sedangkan terdapat 51.811 Warga Negara Indonesia yang tinggal di Jepang berdasarkan data pada bulan Juni 2016. Pada tahun 2017 Jepang telah berinvestasi ke Indonesia sejumlah 5.000 US\$. Kunjungan kenegaraan juga sering dilakukan oleh Para Perdana Menteri Jepang serta menteri-menterinya ke Indonesia sejak tahun 1990 , begitu juga sebaliknya Para Presiden Indonesia serta menteri-menteri sering mengunjungi Jepang, kunjungan kenegaraan Indonesia ke Jepang dimulai pada tahun 1992.⁴⁷

Dalam hal perdagangan, komoditas penting yang diimpor Jepang dari Indonesia adalah antara lain gas alam cair, batubara, hasil tambang, minyak, udang, *pulp*, tekstil dan produk tekstil, perlengkapan listrik, mesin, dll. Sedangkan

⁴⁶ *Ibid.* Hal. 8

⁴⁷ Kementerian Luar Negeri Jepang. (2019). *Japan – Indonesia Relations*. Diakses dari <https://www.mofa.go.jp/region/asia-paci/indonesia/data.html> pada 22 April 2019.

komoditas yang diekspor Jepang ke Indonesia meliputi produk plastik dan kimia , mesin-mesin dan suku-cadang, baja, perlengkapan listrik, suku-cadang elektronik, mesin alat transportasi, dan suku-cadang mobil.⁴⁸

Jika dilihat dari sejarahnya, Jepang merupakan salah satu negara yang sudah lama memiliki kerja sama dengan Indonesia. Kerja sama ini dimulai ketika dibukanya hubungan diplomatik antara Indonesia dan Jepang pada tahun 1958, maka dimulailah berbagai kerja sama bilateral diantara kedua negara ini. Kerja sama bilateral ini telah menghasilkan beberapa kesepakatan, seperti *The Strategic Economic Partnership Agreement* pada tahun 2006 dan *Indonesia Japan Economic Partnership Agreement* pada tahun 2007, serta yang terbaru adalah pembentukan *Japan - Indonesia Maritime Forum* pada tahun 2016.⁴⁹

Selain melakukan kerja sama maritim dengan Jepang, Indonesia juga telah melakukan beberapa kerja sama dengan negara lain dalam bidang maritim, pada tingkat regional wilayah Asia Tenggara, Indonesia telah bergabung dengan AMF sedangkan pada tingkat Asia. Indonesia merupakan anggota dari EAMF. Selain bergabung dengan organisasi yang membahas permasalahan maritim, Indonesia juga menjalin kerja sama maritim dengan beberapa negara seperti India dan China.

Indonesia dan India adalah negara maritim yang telah lama memiliki hubungan pelayaran dan sama-sama memiliki kepentingan maritim diwilayahnya. Kedua negara ini makin memperkuat hubungan kerja sama maritim dengan tujuan untuk mewujudkan perdamaian, stabilitas keamanan dan mendorong pertumbuhan

⁴⁸ Kedutaan Besar Jepang di Indonesia. (2019). *Hubungan Bilateral Indonesia Jepang*. diakses dari https://www.id.e.mb-japan.go.jp/birel_id.html pada 22 April 2019.

⁴⁹ Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI. (2018). *Peningkatan Kerja Sama Bilateral Indonesia-Jepang* diakses dari http://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info%20Singkat-IX-2-II-P3DI-Januari-2017-238.pdf pada 02 Desember 2018

ekonomi serta kesejahteraan ke kawasan Indo-Pasifik. Kerja sama maritim Indonesia dan India ditandai dengan pembuatan *Join Statement* oleh kedua negara pada 12 Desember 2016 ketika Presiden Joko Widodo berkunjung ke India.⁵⁰

Kerja sama maritim Indonesia dan India ini membahas beberapa bidang penting yaitu : meningkatkan kerja sama perdagangan dan investasi, mempromosikan pengembangan sumber daya kelautan yang berkelanjutan, memperluas kerja sama dalam manajemen risiko bencana, melakukan pertukaran budaya dan pariwisata, mempromosikan keselamatan dan keamanan maritim, memperkuat kerja sama akademik, ilmu pengetahuan, dan teknologi.⁵¹

Selain India, Indonesia juga memiliki kerja sama maritim dengan negara China. Salah satu bentuk kerja sama kedua negara ini dilakukan pada tanggal 13 April 2018, di Beijing. Indonesia dan China menggelar seminar yang bertajuk *US\$64 Billion Investment Opportunities in Indonesia for Belt & Road Initiative*. Dalam acara tersebut kerja sama maritim Indonesia dan China diperkuat dengan ditandatanganinya 2 nota kesepahaman dan 5 kontrak kerja sama antara perusahaan-perusahaan dari kedua negara. Nota kesepahaman yang berhasil disepakati oleh kedua negara ini adalah mengenai pengembangan mobil/motor listrik dan pengembangan Tanah Kuning Mangkupadi *Industrial Park* di Kalimantan Utara.⁵²

⁵⁰ Ministry of External Affairs Government of India. (2016). *India-Indonesia Joint Statement during the State visit of President of Indonesia to India*.

⁵¹ *Ibid.*

⁵² Biro Perencanaan dan Informasi Kemenko Maritim. (2018). *Beberapa Kerja Sama Indonesia-Tiongkok Ditandatangani, Menko Luhut: Kami Tidak Ingin Hanya Bicara*. diakses dari <https://maritim.go.id/beberapa-kerja-sama-indonesia-tiongkok-ditandatangani-menko-luhut-kami-tidak-ingin-hanya-bicara/> pada 15 Juni 2019.

Sedangkan kontrak kerja sama yang berhasil ditandatangani terkait pengembangan proyek *hydropower* di Kayan, Kalimantan Utara senilai US\$ 2 miliar, pengembangan industri konversi *dimethyl ethercoal* menjadi gas senilai US\$ 700 juta, lalu perjanjian investasi *joint venture* untuk *hydropower plant* di Sungai Kayan senilai US\$ 17,8 miliar. Selanjutnya yaitu perjanjian investasi *joint venture* pengembangan pembangkit listrik di Bali senilai US\$ 1,6 miliar dan kontrak kerja sama yang terakhir adalah mengenai pengembangan *steel smelter* senilai US\$ 1,2 miliar.⁵³

4.3 Japan -Indonesia Maritime Forum

Japan-Indonesia Maritime Forum merupakan forum yang dibentuk oleh Pemerintah Indonesia dan Jepang untuk membahas kerja sama maritim antara keduanya. Dalam Siaran Pers Bersama yang dikeluarkan oleh kedua negara mengenai *Japan-Indonesia Maritime Forum*, terdapat beberapa hal yang mendorong terbentuknya *Japan-Indonesia Maritime Forum*, yaitu sebagai berikut :

1. Pemerintah Jepang merujuk pada "Strategi Indo-Pasifik Bebas dan Terbuka," dan Pemerintah Indonesia merujuk pada visi "Poros Maritim Dunia". Sebagai dua negara maritim besar yang memiliki kepentingan nasional di wilayah di Samudra Pasifik dan Hindia. Kedua Pemerintah mengakui bahwa adanya kesamaan kepentingan dalam kebijakan-kebijakan yang dibuat, seperti pengembangan konektivitas dan infrastruktur, memperkuat keamanan dan

⁵³ *Ibid.*

keselamatan maritim, dan pentingnya penerapan *free and open maritime order* berdasarkan aturan hukum. Oleh karena itu, kedua Pemerintah sepakat bahwa wajar bagi keduanya untuk mengeksplorasi kemungkinan menyinergikan kebijakan dan terus meningkatkan kerja sama maritim. Forum ini diselenggarakan berdasarkan kebijakan masing-masing negara dan prinsip kesetaraan, saling menguntungkan, serta rasa saling percaya dan keinginan untuk menjaga stabilitas, keamanan dan perdamaian di wilayah.

2. Mengingat pertemuan Jepang-Indonesia yang sukses dalam kesempatan ASEAN Summit 2017 di Manila, yang membahas proyek kerja sama dalam bidang kemaritiman. Dalam *Japan-Indonesia Maritime Forum* ini, kedua negara bersepakat untuk berkerja sama di bidang lain juga. Diskusi diantara kedua pemerintah pada *Japan-Indonesia Maritime Forum* menyimpulkan bahwa Jepang dan Indonesia mengalami kemajuan kerja sama bilateral, oleh karena itu kedua negara berkomitmen untuk melakukan kerja sama di bidang-bidang lain seperti Keamanan dan Keselamatan di Bidang Maritim, Negara Kepulauan dan Negara Pulau, Energi dan Listrik, Infrastruktur dan Konektivitas, dan Pelatihan Kejuruan, termasuk kerja sama internasional mengenai pengembangan daerah pulau tertinggal.

3. Mengingat bahwa tahun 2018 menandai ulang tahun ke-60 hubungan diplomatik Jepang-Indonesia, Pemerintah Indonesia dan Jepang dalam *Japan-Indonesia Maritime Forum* berkomitmen untuk mempererat hubungan kerja sama dalam mewujudkan pembangunan proyek-proyek dalam *Japan-Indonesia Maritime Forum*.

Japan–Indonesia Maritime Forum tidak terbentuk secara tiba-tiba melainkan membutuhkan proses selama 3 tahun. Proses pembentukan *Japan-Indonesia Maritime Forum* diawali dengan pembahasan mengenai *Strengthening of the Strategic Partnership Underpinned by Sea and Democracy* pada tanggal 23 Maret 2015 di Tokyo, Jepang. Pada kesempatan ini, Ir. H. Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia, dan Ibu Iriana Joko Widodo mengunjungi Jepang dari tanggal 22 hingga 25 Maret 2015, atas undangan pihak Jepang. Presiden Joko Widodo dan Ibu Iriana Joko Widodo memenuhi undangan Kekaisaran Jepang dan bertemu Kaisar dan Permaisuri Kekaisaran Jepang pada 23 Maret 2015. Pertemuan ini dilanjutkan dengan pertemuan antara Shinzo Abe, Perdana Menteri Jepang dan Presiden Joko Widodo pada hari yang sama.

Pertemuan ini berisi pembahasan mengenai kerja sama Indonesia dibidang maritim, politik, keamanan, ekonomi, pertukaran budaya, dan kerja sama regional dan internasional. Dalam pertemuan ini kedua pemimpin menyatakan komitmen mereka untuk memperkuat *Strategic Partnership Underpinned by Sea and Democracy* yang berdasarkan pada kerja sama yang saling menguntungkan, hubungan persahabatan dan kesamaan nilai-nilai fundamental. Pada pertemuan inilah kedua negara sepakat untuk mendirikan *Japan-Indonesia Maritime Forum* sesegera mungkin untuk lebih memperkuat dan mempercepat kerja sama maritim dibidang keselamatan dan keamanan maritim

dan industri maritim sebagai salah satu pilar penting dalam meningkatkan hubungan kerja sama bilateral kedua negara.⁵⁴

Bentuk realisasi dari *Strengthening of the Strategic Partnership Underpinned by Sea and Democracy* ini adalah kunjungan kerja ke Jepang oleh Menteri Koordinator Kemaritiman, Luhut Pandjaitan yang didampingi oleh Meneg PPN/Bappenas, Wakil Menteri ESDM, Kepala BPPT, Kepala Bakamla, Deputi Kedaulatan Maritim dan, Deputi Infrastruktur Kemenko Maritim pada 20 – 21 Desember 2016.

Terdapat beberapa agenda utama dalam kunjungan kerja ini yaitu : (1) Pembentukan Indonesia *Japan-Indonesia Maritime Forum*, (2) Pembahasan Kerja sama Infrastruktur, antara lain, Pelabuhan Patimban, Kereta Api Cepat Jakarta – Surabaya, dan (3) Pembahasan Kerja Sama Keamanan Laut. Pada kesempatan ini Menko Maritim juga membahas kerja sama strategis dengan Jepang di kawasan Sabang, Natuna, Morotai, dan Maluku. Pada kesempatan ini, Menko Maritim Luhut Pandjaitan bertemu dengan pejabat tinggi Pemerintah Jepang yaitu Menlu Jepang Fumio Kishida, Menteri LITT (*Land, Infrastructure, Transport and Tourism*) Keiichi Ishii, Menteri ETI (*Economy, Trade and Industry*) Hiroshige Seko, Sekjen Partai LDP sekaligus Ketua Persahabatan Parlemer Indonesia – Jepang Toshihiro Nikai dan Mantan PM. Yasuo Fukuda sebagai tokoh *Japan-Indonesia Friendship Society*. Menko Luhut bersama Delegasi Indonesia juga bertemu dengan kalangan industri Jepang yaitu *Ports and Harbors Association of*

⁵⁴ Kementerian Luar Negeri Jepang. “*Japan - Indonesia Joint Statement - Towards Further Strengthening of the Strategic Partnership Underpinned by Sea and Democracy - March 23, 2015*” diakses dari <https://www.mofa.go.jp/files/000072695.pdf> pada 09 April 2019.

Japan, Sumitomo Corp, Taisei Corp, Chiyoda Corp, Teijin Limited, Marubeni Corp, Sumitomo Mitsui Banking Corp dan INPEX.

Pembentukan *Japan-Indonesia Maritime Forum* dibentuk pada tanggal 21 Desember 2016. *Japan-Indonesia Maritime Forum* diresmikan melalui penandatanganan *Memorandum of Cooperation to Establish Indonesia-Japan Maritim Forum* oleh Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Republik Indonesia Luhut Binsar Panjaitan dan Menteri Luar Negeri Jepang Fumio Kishida. Cakupan kerja sama dalam forum ini meliputi (a) kerja sama di bidang keamanan maritim dan keselamatan laut (b) Pembangunan ekonomi maritim (c) pembangunan infrastruktur maritim dan (d) pendidikan dan pelatihan maritim.⁵⁵

Selanjutnya pada tanggal 15-16 Januari 2017 diadakan pertemuan *Strengthening Strategic Partnership* di Jakarta, Indonesia. Perdana Menteri Jepang, Shinzo Abe berkunjung ke Indonesia atas undangan Presiden Joko Widodo. Dalam pertemuan ini Perdana Menteri Jepang dan Presiden Indonesia berdiskusi mengenai kerja sama bilateral dan juga membicarakan isu-isu regional dan global. Kedua pemimpin berkomitmen untuk memperkuat kerja sama dalam bidang maritim, politik, ekonomi, dan budaya. Dalam pertemuan ini Pemerintah Jepang dan Indonesia menyambut baik pendirian *Japan-Indonesia Maritime Forum* pada 21 Desember 2016 yang bertujuan untuk memperkuat dan mempercepat kerja sama dibidang maritim seperti keamanan dan keselamatan

⁵⁵ Humas Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman. “*Indonesia-Jepang Bentuk Indonesia-Japan Maritime Forum*” diakses dari <https://maritim.go.id/indonesia-jepang-bentuk-indonesia-japan-maritime-forum/> pada 10 April 2019.

maritim, industri maritim. Infrastruktur maritim, energi dan pengembangan pulau-pulau terluar.⁵⁶

Pada 12 November 2017, PM Jepang, Shinzo Abe yang sedang mengunjungi Manila, Filipina untuk menghadiri ASEAN Summit 2017, mengadakan pertemuan dengan Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo. Pada pertemuan ini PM Jepang ditemani oleh Wakil Kepala Sekretaris Kabinet Pemerintah Jepang yaitu, Kotaro Nogami, sedangkan pihak yang mendampingi Presiden Indonesia adalah Menteri Luar Negeri Indonesia yaitu Retno L. P. Marsudi. Hal-hal yang dibahas dalam pertemuan ini antara lain kerja sama infrasktur maritim, pengembangan pulau terluar, pinjaman dari JICA untuk proyek pembangunan Pelabuhan Patimban dan *Development of World Class University* bagi Universitas Gadjah Mada, kerja sama pihak Jepang dan BAKAMLA, pembahasan isu LCS dan Korea Utara dan peluncuran mengenai logo perayaan hubungan persahabatan Indonesia – Jepang ke-60 tahun. Selain itu Jepang juga mendukung Indonesia yang pada saat itu akan menyelenggarakan ASEAN Games dan Pertemuan Tahunan Bank Dunia dan IMF yang akan diselenggarakan di Bali.⁵⁷

Menindaklanjuti pertemuan Jepang-Indonesia yang sukses dalam kesempatan ASEAN Summit 2017, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Republik Indonesia, Letnan Jenderal (Purnawiran) Luhut B. Pandjaitan melakukan kunjungan ke Jepang dari tanggal 12 sampai 13 Desember 2017.

⁵⁶ Kementerian Luar Negeri Jepang. “*Japan-Indonesia Joint Statement on Strengthening Strategic Partnership*” diakses dari <https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/000218457.pdf> pada 10 April 2019.

⁵⁷ Kementerian Luar Negeri Jepang. “*Japan-Indonesia Summit Meeting*” diakses dari https://www.mofa.go.jp/sa/sea2/id/page3e_000782.html pada 10 April 2019

Menteri Luhut bertemu dengan Yang Mulia Kazuyuki Nakane, Menteri Luar Negeri Jepang pada tanggal 13 Desember 2017. Barulah pada kunjungan ini kedua Menteri menyelenggarakan *Japan-Indonesia Maritime Forum*. Forum ini berisi tentang kerja sama Jepang dan Indonesia di bidang keamanan dan keselamatan di bidang maritim, negara kepulauan dan negara pulau, energi dan listrik, infrastruktur dan konektivitas, dan pelatihan kejuruan, termasuk kerja sama internasional mengenai pengembangan daerah pulau tertinggal.⁵⁸

Kemudian, pada tanggal 25 Juni 2018, Menteri Luar Negeri Jepang Kono Taro yang bertemu dengan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Indonesia Luhut Binsar Panjaitan di Jakarta, Indonesia. Pada kesempatan ini diselenggarakan *2nd Joint Committee Japan-Indonesia Maritime Forum*, dengan isi pertemuan yaitu : Jepang sangat mendukung penyelenggaraan *Annual Meetings of the International Monetary Fund and World Bank Group* di Bali pada Oktober 2018. Menteri Luar Negeri Jepang mengemukakan pula keinginan untuk semakin mempererat hubungan di bidang maritim melalui tindak lanjut *Japan-Indonesia Maritime Forum* pertama yang telah diselenggarakan ketika Menko Luhut berkunjung ke Jepang pada 13 Desember 2017. Selain itu pertemuan ini juga membahas mengenai proyek kerja sama bilateral, antara lain upaya perbaikan iklim ekonomi guna meningkatkan investasi dari Jepang, MRT, Pelabuhan Patimban, akselerasi pembangunan jalur kereta api lintas Utara Pulau Jawa, tol Sumatera dan lain-lain.

⁵⁸ Kementerian Luar Negeri Jepang. “*The Joint Press Release by the Ministry of Foreign Affairs of Japan and Coordinating Ministry of Maritime Affairs of the Republic of Indonesia*” diakses dari <https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/000323211.pdf> 19 Maret 2019

Kedua menteri juga menyambut baik pendandatanganan *Exchange of Notes (EN) on “Program for the Development of Fisheries Sector in Outer Islands”* guna pembangunan pelabuhan perikanan dan pasar ikan di pulau-pulau terluar Indonesia. Pada pertemuan ini juga dibahas mengenai isu LCS dan kerja sama antara “Strategi Indo-Pasifik yang Bebas dan Terbuka” dan gagasan “Poros Maritim Dunia” yang diajukan oleh Indonesia.⁵⁹ Untuk mempermudah melihat proses perjalanan pembentukan *Japan-Indonesia Maritime Forum*, berikut dibawah ini tabel yang akan berisi tentang nama kegiatan, aktor, tanggal dan tempat pelaksanaan serta bentuk kerja sama.

⁵⁹ Kedutaan Besar Jepang di Indonesia. “*Pertemuan Menteri Luar Negeri Jepang Kono Taro dan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman RI Y. M. Bapak Luhut Binsar Panjaitan (Penyelenggaraan the 2nd Joint Committee Japan-Indonesia Maritime Forum)* diakses dari https://www.id.emb-japan.go.jp/news18_14.html pada 11 April 2019

Tabel 4.1. Proses Pendirian *Japan-Indonesia Maritime Forum*

No	Nama Kegiatan	Aktor Penting	Tanggal & Tempat Pelaksanaan	Bentuk Kerja Sama
1	<i>Strengthening of the Strategic Partnership Underpinned by Sea and Democracy</i>	Perdana Menteri, Jepang Shinzo Abe, dan Presiden, Joko Widodo	23 Maret 2015, Tokyo, Jepang	Kerja sama maritim, politik, keamanan, ekonomi, pertukaran budaya, dan kerja sama regional dan internasional
2	Penandatanganan <i>Memorandum of Cooperation to Establish Indonesia-Japan Maritime Forum</i>	Menko Maritim, Luhut Pandjaitan, dan Menlu Jepang Fumio Kishida	21 Desember 2016, Jepang	Kerja sama Keamanan maritim dan keselamatan laut, pembangunan ekonomi maritim pembangunan infrastruktur maritim dan pendidikan dan pelatihan maritim.
3	Pertemuan <i>Strengthening Strategic Partnership</i>	Perdana Menteri, Jepang Shinzo Abe, dan Presiden, Joko Widodo	15-16 Januari 2017, Jakarta, Indonesia	Kerja sama dalam bidang maritim, politik, ekonomi, dan budaya
4	<i>Japan – Indonesia Summit</i>	Perdana Menteri, Jepang Shinzo Abe, dan Presiden, Joko Widodo	12 November 2017, Manila, Filipina	Kerja sama infrasktur maritim, pengembangan pulau terluar, pinjaman dari JICA untuk proyek pembangunan pelabuhan dan pengembangan universitas kelas dunia pembahasan isu LCS dan Korea Utara
5	Penyelenggaraan <i>Japan-Indonesia Maritime Forum</i>	Menko Maritim, Luhut Pandjaitan, dan Wamenlu Jepang, Kazuyuki Nakane	13 Desember 2017, Jepang	Kerja sama keamanan dan keselamatan di bidang maritim, negara kepulauan dan negara pulau, energi dan listrik, infrastruktur dan konektivitas, dan pelatihan kejuruan, termasuk kerja sama internasional mengenai pengembangan daerah pulau tertinggal.
6	Penyelenggaraan <i>the 2nd Joint Committee Japan-Indonesia Maritime Forum</i>	Menko Maritim, Luhut Pandjaitan, dan Menlu Jepang, Kono Taro	25 Juni 2018, Jakarta, Indonesia	Kerja sama ekonomi dan infrastruktur maritim dan penandatanganan <i>Exchange of Notes (EN) on “Program for the Development of Fisheries Sector in Outer Islands”</i>

Sumber : diolah oleh peneliti

BAB VI PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Tujuan khusus kebijakan luar negeri Indonesia mengenai *Japan-Indonesia Maritime Forum* adalah tujuan inti sedangkan kepentingan nasional Indonesia terhadap Jepang dalam *Japan-Indonesia Maritime Forum* Periode 2017–2018, adalah sebagai berikut :

1. Kepentingan Nasional Indonesia pada kepentingan pertahanan adalah tentang Keamanan dan Keselamatan di bidang Maritim dan mengenai *Archipelagic and Island States* atau Negara Kepulauan dan Negara Pulau.
2. Kepentingan ekonomi Indonesia yaitu Pembangunan Ekonomi termasuk Infrastruktur dan Konektivitas di Indonesia Pada Bidang Maritim, Pembangunan Infrastruktur, Pengembangan Pulau-Pulau Terluar dan Isu Ekonomi lainnya.
3. Kepentingan Indonesia pada tatanan dunia adalah menjaga stabilitas politik dan keamanan kawasan Semenanjung Korea, Asia Tenggara, dan mendukung dunia bebas nuklir.
4. Kepentingan ideologi Indonesia pada *Japan-Indonesia Maritime Forum* adalah Mempertahankan Nilai Perdamaian dan Nilai Demokrasi.

Intensitas keempat dasar kepentingan nasional Indonesia ini bersifat *major* yang berarti bahwa politik, ekonomi dan ideologis Indonesia terpengaruh oleh peristiwa dan trend pada dunia internasional. Hal ini dapat disimpulkan bahwa Kepentingan Nasional Indonesia terhadap Jepang dalam *Japan-Indonesia Maritime Forum* Periode 2017–2018 memiliki intensitas *major*.

Gagasan Presiden Jokowi dalam mewujudkan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia memiliki lima pilar utama yaitu : 1. membangun kembali budaya maritim Indonesia. 2. menjaga dan mengelola sumber daya laut 3. Komitmen mendorong pengembangan infrastruktur dan konektivitas maritim. 4. Diplomasi maritim dan membangun kemitraan 5. Membangun kekuatan pertahanan maritim. Jika dilihat dari lima pilar Poros Maritim Dunia di atas, kesemua pilar tersebut terdapat dalam *Japan–Indonesia Maritime Forum*, sehingga dapat disimpulkan bahwa Kepentingan Nasional Indonesia terhadap Jepang dalam *Japan-Indonesia Maritime Forum* Periode 2017–2018 adalah langkah nyata Presiden Jokowi dalam mewujudkan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia.

6.2 Kritik dan Saran

1. Pada kerja sama *Japan–Indonesia Maritime Forum ini*, dalam kepentingan ekonomi terdapat banyak proyek yang dibiayai dengan pinjaman melalui JICA. Walaupun pinjaman ini membantu Indonesia dalam membangun infrastruktur dan konektivitas di bidang maritim, Indonesia harus berhati-hati dalam menjalankan kerja sama ini agar tidak terjebak pada hutang yang berkepanjangan.

2. Pembentukan *Japan–Indonesia Maritime Forum* ini didorong oleh perayaan hubungan Indonesia dan Jepang yang ke-60, diharapkan hubungan kerja sama Indonesia tidak hanya berhenti pada *Japan–Indonesia Maritime Forum*, tetapi juga kerja sama-kerja sama lainnya sesuai dengan kepentingan Indonesia.
3. Pada penelitian ini sumber data lebih mudah didapatkan dari pemerintah Jepang, sedangkan data dari pemerintah Indonesia relatif sulit mendapatkannya, oleh karena itu sebaiknya Pemerintah Indonesia terutama Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman bisa menjadikan websitenya menjadi sumber informasi agar masyarakat Indonesia dapat mudah mengetahui kerja sama–kerja sama yang dilakukan oleh Indonesia dan negara lain.
4. Selat Melaka merupakan selat yang penting bagi jalur distribusi barang di perairan Asia Tenggara, penting bagi negara-negara untuk mengamankan jalur ini, negara Jepang merupakan salah satu negara yang berkepentingan dalam jalur ini, hal ini karena kapal pembawa minyak Jepang melintasi jalur ini, namun dalam *Japan-Indonesia Maritime Forum*, permasalahan keamanan Selat Melaka tidak menjadi prioritas bagi Jepang dan Indonesia. Seharusnya Jepang dan Indonesia memasukan masalah Selat Melaka dalam pembahasan kerja sama dibidang maritim dalam *Japan-Indonesia Maritime Forum*.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Andrew, Billo dan Huang Jing. 2015. *Territorial Disputes in the South China Sea*, Palgrave Macmillan. London.
- ASEAN, Masyarakat. 2016. *Membangun Kiprah Maritim Indonesia Di Kawasan*. Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN Kementerian Luar Negeri. Jakarta.
- Babbie, Earl. 2014. *The Basics of Social Research*. Wadsworth, Cengage Learning .Wadsworth.
- Bakry, Suryadi U. 2016. *Metode Penelitian Hubungan Internasional*. Pustaka Pelajar.
- Bryman, Alan. 2012. *Social Research Methods 4th Edition*. Oxford University Press. New York.
- Burchill , Scott . 2005. *The National Interest in International Relations Theory*. Palgrave Macmillan. New York.
- Guion, Lisa A. 2002. *Triangulation: Establishing the Validity of Qualitative Studies*. University of Florida . Florida.
- Hayton, Bill. 2014. *The South China Sea The Struggle For Power In Asia*. Yale University Press Publications. New Haven, Connecticut.
- Ho, Joshua H. dan Sam Bateman. 2012. *Maritime Challenges and Priorities in Asia*. Routledge, New York.
- Holsti, K.J.1988. *Politik Internasional Kerangka Untuk Analisis*. Penerbit Airlangga. Jakarta.
- Klotz , Audie dan Deepa Prakash. 2008. *Qualitative Methods in International Relations A Pluralist Guide*. Palgrave Macmillan. New York.
- Mas'ood, Mohtar. 1994. *Ilmu Hubungan Internasional Displin dan Metodologi*. Pustaka LP3ES Indonesia. Jakarta.

- Miles, B Matthew dan Michael Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif*. Universitas Indonesia Press. Jakarta.
- Nuechterlein ,Donald E. 1976. *National Interests and Foreign Policy: A Conceptual Framework for Analysis and Decision-Making*. British Journal of International Studies. Vol2.
- Perwita, AA Banyu dan Bantarto Bandoro. 2013. *Pengantar Kajian Strategis*. Graha Ilmu. Yogyakarta.
- Raco, J. R. 2010. *Metode Peneliltian Kuailitatif Jenis, Karakteristik, Dan Keunggulannya*. PT Gramedia Widiasarana Indonesia. Jakarta.
- Sitepu, P. Anthonius. 2011. *Studi Hubungan Internasional*. Graha Ilmu. Yogyakarta.
- Sorensen, Georg dan Robert Jackson. 2013. *Introduction Tointernational Relations Theories And Approaches Fifth Edition*. Oxford University Press Inc. New York.
- Sugiyono. 2014. *Metode Peneliteiten Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta. Bandung.

Report/Working Paper:

- Bidang Kemaritiman, Kementerian Koordinator. 2018. *Laporan Kinerja Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Tahun 2017*. Jakarta.
- . 2017. *Laporan Tahunan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Tahun 2016*. Jakarta.
- DPR RI, Pusat Penelitian Badan Keahlian. *Peningkatan Kerja Sama Bilateral Indonesia-Jepang* . Jakarta
- Indonesia Office, Press Release Japan International Cooperation Agency (JICA). 2017. “*Kerjasama Dua Negara Kepulauan Untuk Meningkatkan Kapasitas Keamanan Laut di Indonesia – Penandatanganan Dokumen Perjanjian Kerjasama Teknis Untuk Pengembangan Kapasitas Badan Keamanan Laut (BAKAMLA)*”. Jakarta.
- Jakarta, PT MRT. 2017. “*Laporan Tahunan 2017 Jejak Langkah*”. Jakarta.

Sumber Online :

- Dai, Xinyuan, Duncan Snidal, dan Michael Sampson. 2017. *International Cooperation Theory and International Institutions*. Internatioan Studies Association and Oxford University Press. diakses dari <http://oxfordre.com> pada 3 Februari 2019.
- Dalam Negeri, Kementerian. 2018. “*Legok Nangka Siap Proses Sampah Jadi Energi Listrik*” diakses dari <https://www.kemendagri.go.id/blog/27742-Legok-Nangka-Siap-Proses-Sampah-Jadi-Energi-Listrik> pada 15 Mei 2019.
- Economist. 2015. “*Sea of Troubles*” diakses dari <https://www.economist.com/leaders/2015/05/02/sea-of-troubles> pada 20 November 2018.
- Iketa, Keita. 2016. *Japan, Indonesia to Set Up Maritime Forum*. The Jakarta Post. Jakarta diakses dari <https://www.thejakartapost.com/news/2016/12/20/japan-indonesia-to-set-up-maritime-forum.html> pada 2 April 2019.
- Indonesia, Kedutaan Besar Jepang. 2019. *Hubungan Bilateral Indonesia Jepang*. Diakses dari https://www.id.emb-japan.go.jp/birel_id.html pada 22 April 2019.
- . 2018. “*ASEM Symposium on Promoting Tourism (Simposium ASEM untuk Mempromosikan Pariwisata)*” di akses dari https://www.id.emb-japan.go.jp/about_id_ambsnews71.html pada 20 Mei 2019.
- . 2019 “*Pertemuan Menteri Luar Negeri Jepang Kono Taro dan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman RI Y. M. Bapak Luhut Binsar Panjaitan (Penyelenggaraan the 2nd Joint Committee Japan-Indonesia Maritime Forum)*” diakses dari https://www.id.emb-japan.go.jp/news18_14.html pada 11 April 2019.
- Indonesia, UNDP . 2018. “*Archipelagic and island states ministers reach a milestone with declaration on sustainable ocean, climate actions*” diakses dari <http://www.id.undp.org/content/indonesia/en/home/presscenter/pressreleases/2018/9/archipelagic-and-island-states-ministers-reach-a-milestone-with.html> pada 25 Mei 2019.
- Info Board, ASEM. 2018. “*ASEM Symposium on Promoting Tourism in Jakarta*” diakses dari <https://www.aseminfoboard.org/events/asem-symposium-on-promoting-tourism-in-jakarta> pada 20 Mei 2019.
- Jakarta, MRT. 2019. “*Sejarah*” diakses dari <https://www.jakartamrt.co.id/mrt-jakarta/sejarah-mrt-jakarta/> pada 17 Mei 2019.

Jepang, KBRI. 2017. “*Pertemuan Bilateral Presiden RI dan Perdana Menteri Jepang di Sela-sela KTT ASEAN 2017 dan Peluncuran Logo Peringatan Ke-60 Tahun Hubungan Diplomatik RI-Jepang*” diakses dari <https://kbritokyo.jp/berita/pertemuan-bilateral-presiden-ri-dan-perdana-menteri-jepang-di-sela-sela-ktt-asean-2017-dan-peluncuran-logo-peringatan-ke-60-tahun-hubungan-diplomatik-ri-jepang/> pada 20 Mei 2019

Kemenko Bidang Kemaritiman, Biro Informasi dan Hukum. 2018. “*Delegasi SOM Sepakati Deklarasi Pembentukan Forum Negara Kepulauan dan Negara Pulau*” diakses dari <https://maritim.go.id/delegasi-som-sepakati-deklarasi-pembentukan-forum-negara-kepulauan-dan-negara-pulau/> pada 25 Mei 2019

———. 2018. “*RI Gandeng Jepang untuk Distribusikan LNG dan Bangun Pembangkit Listrik di Indonesia Timur*” diakses dari <https://maritim.go.id/ri-gandeng-jepang-untuk-distribusikan-lng-dan-bangun-pembangkit-listrik-di-indonesia-timur/> pada 15 Mei 2019.

———. 2018. “*Bali Untung 5.4 Triliun Rupiah dari Mega Even IMF-WBG, Menko Luhut:Trust Investor Juga Makin Besar*” diakses dari <https://maritim.go.id/bali-untung-5-4-triliun-rupiah-dari-mega-even-imf-wbg-menko-luhuttrust-investor-juga-makin-besar-2/> pada 03 Juni 2019.

Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko. 2015. “*Perjanjian Kerjasama Pemerintah Indonesia Dan Jepang*” diakses dari <http://www.djppr.kemenkeu.go.id/page/load/1389> pada 17 Mei 2019.

Koordinator Bidang Kemaritiman, Humas Kementerian. “*Indonesia-Jepang Bentuk Indonesia-Japan Maritime Forum*” diakses dari <https://maritim.go.id/indonesia-jepang-bentuk-indonesia-japan-maritime-forum/> pada 10 April 2019.

———. 2018. “*PLTSa Kerja Sama Indonesia-Jepang Bisa Jadi Solusi Masalah Sampah yang Ramah Lingkungan*” diakses dari <https://maritim.go.id/pltsa-kerja-sama-indonesia-jepang-bisa-jadi-solusi-masalah-sampah-yang-ramah-lingkungan/> pada 15 Mei 2019.

Luar Negeri Jepang, Kementerian. 2019. *Japan – Indonesia Relations*. diakses dari <https://www.mofa.go.jp/region/asia-paci/indonesia/data.html> pada 22 April 2019.

———. 2019. *Japan - Indonesia Joint Statement - Towards Further Strengthening of the Strategic Partnership Underpinned by Sea and Democracy - March 23, 2015* diakses dari <https://www.mofa.go.jp/files/000072695.pdf> pada 09 April 2019.

—————. 2019. *Japan-Indonesia Joint Statement on Strengthening Strategic Partnership* diakses dari <https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/000218457.pdf> pada 10 April 2019.

—————. 2019. *Japan- Indonesia Summit Meeting* diakses dari https://www.mofa.go.jp/sa/sea2/id/page3e_000782.html pada 10 April 2019

—————. 2019. *The Joint Press Release by the Ministry of Foreign Affairs of Japan and Coordinating Ministry of Maritime Affairs of the Republic of Indonesia on the occasion of the visit of Coordinating Minister for Maritime Affairs Lt. Gen. (Retired) Luhut B. Pandjaitan to Japan* diakses dari <https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/000323211.pdf> 19 Maret 2019

Org, ASEAN. 2012. *Chairman's Statement, 1st Expanded ASEAN Maritime Forum Manila* diakses dari <https://asean.org/1st-expanded-asean-maritime-forum-manila/> pada 3 Februari 2019.

Penyediaan Infrastruktur Prioritas, Komite Percepatan. 2019. “*Central – West Java Transmission Line 500 KV*” diakses dari <https://kppip.go.id/proyek-prioritas/ketenaga-listrikan/central-west-java-transmission-line-500-kv/> pada 7 Juni 2019.

—————. 2019. “*Transmisi Sumatra 500 KV*” <https://kppip.go.id/proyek-prioritas/ketenaga-listrikan/transmisi-sumatera-500-kv/> pada 7 Juni 2019.

—————. 2018. “*Pembangunan Pelabuhan Patimban*” <https://kppip.go.id/proyek-strategis-nasional/> pada 16 Mei 2019.

—————. 2019. “*Pengolahan Air Limbah Jakarta*” diakses dari <https://kppip.go.id/proyek-prioritas/air-dan-sanitasi/pengolahan-air-limbah-jakarta/> pada 19 Mei 2019

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian . 2017. “*Jakarta Sewerage System Dimulai 2017*” diakses dari <https://www.pu.go.id/berita/view/11123/jakarta-sewerage-system-dimulai-2017> pada 19 Mei

Perencanaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan, Direktorat. 2018 “*The 2nd Meeting Kerjasama Indonesia – Jepang tentang LNG Distribution and Power Plant in Eastern Indonesia*” diakses dari <https://kkp.go.id/djprl/prl/artikel/3626-the-2nd-meeting-kerjasama-indonesia-jepang-tentang-lng-distribution-and-power-plant-in-eastern-indonesia> pada 15 Mei 2019.

Republik Indonesia, Kementerian Keuangan. 2018. “*Ini Manfaat Indonesia sebagai Tuan Rumah IMF-WBG Annual Meetings 2018*”. diakses dari

<https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/ini-manfaat-indonesia-sebagai-tuan-rumah-imf-wbg-annual-meetings-2018/> pada 02 Juni 2019

Republik Indonesia, Kementerian Perhubungan. 2019. “*Soft Opening Pelabuhan Patimban Akhir Tahun 2019*” diakses dari <http://hubla.dephub.go.id/berita/Pages/SOFT-OPENING-PELABUHAN-PATIMBAN-AKHIR-TAHUN-2019.aspx> pada 17 Mei 2019.

Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Kementerian. 2018. “*Riset Pengembangan Mobil Listrik Libatkan Perguruan Tinggi dan Industri Otomotif*”. diakses dari <https://ristekdikti.go.id/kabar/riset-pengembangan-mobil-listrik-libatkan-perguruan-tinggi-dan-industri-otomotif/#IV7e31gBLBdHAmzV.99> pada 23 Mei 2019.

Shipowners’ Association, Indonesian National. 2018. “*Menteri Transportasi Jepang Tinjau Patimban*” diakses dari <http://insa.or.id/menteri-transportasi-jepang-tinjau-patimban/> pada 17 Mei 2019.

State Documents & Translation, Office of Assistant to Deputy Cabinet Secretary. 2018. “*President Jokowi Inaugurates Construction of Padang-Pekanbaru Toll Road*” diakses dari <https://setkab.go.id/en/president-jokowi-inaugurates-construction-of-padang-pekanbaru-toll-road/> pada 31 Mei 2019.

Times, Japan. 2018. “*Toyota Assists Indonesia Developing Eco-Friendly Vehicles*” diakses dari <https://www.japantimes.co.jp/news/2018/07/12/business/corporate-business/toyota-assists-indonesia-developing-eco-friendly-vehicles/#.XOTnOTTSLIV> pada 23 Mei 2019.